

No. 151 Agustus - September 2018

www.bakti.or.id

BaKTI News

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

- 
- INOVASI MUSRENBANG OTSUS PAPUA
 - PUSKESMAS DI BATAS NEGARA
 - REALITAS HIDUP DALAM BIDIKAN LENSА PEREMPUAN KAMPUNG
 - KESETARAAN GENDER DALAM SDGs

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices & Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News** Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI News

Agustus - September 2018

No. 151

1 Inovasi Musrenbang Otsus Papua

Oleh **RAHMAN RAMLAN**

7 Melayani Rakyat melalui Gerakan SoBAT

Oleh **ASRI SAMSU & YUDI WIJANARKO**

11 Puskesmas di Batas Negara

Oleh **N.J. TANGKEPAYUNG**

15 Semangat Membangun Masa Depan Anak Bangsa

Oleh **NOVI ARIYANTO**

19 Realitas Hidup dalam Bidikan Lensa Perempuan Kampung

Oleh **MANSETUS BALAWALA**

23 Sosialisasi Efektif ala Sekber Asmat

Oleh **SYAIFULLAH**

27 Mengapa Perlu Analisis Kebijakan Berbasis Bukti (Bagian 1)

Oleh **MUGNIAR MARAKARMA**

29 Kesetaraan Gender dalam SDGs

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

33 Hubungkan Tanah Papua, Targetkan Indonesia Merdeka Internet 2019

Oleh **NOOR IZA**

37 Penelitian "Water-Sensitive Cities" Lepas Landas di 12 Lokasi di Makassar

Oleh **INA RAHLINA**

40 Kegiatan di BaKTI

41 Info Buku

■ Foto Cover : Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI



Ruang sekolah di daerah yang terpencil.

Bukan hanya masalah infrastruktur saja yang kurang baik, tingkat kehadiran guru yang rendah menjadi kendala lain yang bisa memperparah kualitas pendidikan di negeri ini.

Foto : **Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI**



Inovasi Musrenbang Otsus Papua

Oleh **RAHMAN RAMLAN**

Otonomi khusus Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Tujuannya? Untuk mengurangi kesenjangan, melindungi hak-hak Orang Asli Papua serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Papua.

Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab ini perlu diberikan untuk menjawab pertanyaan: Apakah masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua tahu dan merasakan manfaat Otsus Papua? Survei bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Universitas Cendrawasih pada tahun 2017 menunjukkan fakta hanya 36% dari Orang Asli Papua yang mengetahui wujud pemanfaatan dana Otsus untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi berbasis kemasyarakatan.

Artinya di sepanjang usia otonomi khusus Papua selama 17 tahun kebijakan ini masih belum menjadi pengetahuan seluruh masyarakat Papua.

Fakta ini, merupakan fakta yang menantang perubahan. Sebab fakta ini tidak berbanding lurus dengan upaya pemerintah Papua dalam kurun 17 tahun terakhir.



Foto : N.J. Tangkepayung/ Yayasan BaKTI

Fakta ini memuat ketidakpercayaan kepada pemerintah, didalamnya ada kesangsian terhadap azas manfaat dana Otsus, disana ada antipati. Jadi harus ada tindakan strategis untuk mengubah keadaan ini, harus ada fakta baru yang dimunculkan mengenai wujud dan aplikasi kebijakan asimetris Otsus Papua.

Sebab pemerintah telah bekerja, mengupayakan kekhususan ini menjadi alat ungkit kesejahteraan, kemandirian Orang Asli Papua.

Sebuah sistem yang mengakomodir kekhususan perlu dibangun, ketidaktauan dan kesangsian masyarakat harus ditepis. Harus ada perubahan, perubahan yang menjamin ada transparansi dalam seluruh proses pemanfaatan dana Otsus Papua.

Perubahan strategis yang dapat dilakukan adalah dengan merenovasi elemen perencanaan pembangunan.

Dibutuhkan sistem perencanaan di luar kebiasaan untuk kebijakan yang sifat dasarnya pun tidak untuk menjawab tantangan yang pada umumnya dihadapi oleh provinsi lain di Indonesia. Sebuah sistem perencanaan yang relevan dengan keunikan dan keragaman kultural Papua. Sistem yang pas untuk kaum yang berdiam di Lapago, Meepago, Mamta, Saereri dan Anim-Ha. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem perencanaan kontekstual Papua.

Sistem perencanaan kontekstual Papua ini diajukan sebagai inisiatif untuk memproyeksi perubahan hakiki bagi Papua, secara khusus untuk Orang Asli Papua. Sebuah Musrenbang yang bukan sekedar Musrenbang, melainkan Musrenbang khusus yang berbasis budaya, berbasis wilayah adat Papua. Musrenbang khusus ini dibangun untuk melengkapi sistem perencanaan kontekstual Papua. Sistem perencanaan kontekstual Papua harus memuat ciri ketangguhan dalam kekhususan proses perencanaan.

Apa yang luput dalam mekanisme yang sudah ada, harus hadir dalam sistem perencanaan pembangunan kontekstual ini. Sifat-sifat itu antara lain: Sistem ini harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat yang diwakili tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan dalam proses perencanaan. Kedua sistem ini perlu memiliki kemampuan mengakomodir kebutuhan berbasis wilayah adat terfokus pada kepentingan Orang Asli Papua jadi bukan lagi semata sektoral. Seperti pada sistem yang baku yang selama ini berlaku.

Prosa Luna Vidya, Musrenbang Otsus Papua



Foto : N.J. Tangkepayung/Yayasan BaKTI

Jam menunjukkan pukul 3 dini hari, saat saya terjaga di sebuah kamar hotel tengah kota Merauke akhir Mei lalu. Saya kemudian keluar kamar bermaksud mencari makan sahur. Tetiba langkah kaki saya tertahan. Kaget melihat aktivitas yang tidak biasa di sebuah cafetaria yang akan saya lewati menuju restoran hotel. Tampak belasan orang berkelompok di beberapa meja. Masing-masing meja duduk satu orang yang sibuk mengetik dan dikelilingi oleh beberapa orang yang membuka-buka dokumen seraya menunjukkan layar laptop. Saya baru tersadar setelah mendekat, rupanya mereka adalah utusan dari pemerintah kabupaten yang sedang mengisi E-PapuaPu Musrenbang sebuah inovasi-penggunaan aplikasi perencanaan oleh BAPPEDA Papua pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musnrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.

Meskipun sebagian besar kabupaten agak telat mengisi aplikasi dikarenakan keterbatasan jaringan internet, namun antusiasme peserta

Musrenbang Otsus tahun 2018 ini memang jauh berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu tampak dari ramai dan alotnya tahapan diskusi pembahasan yang berlangsung hingga tengah malam.

Seorang peserta dari salah satu kabupaten wilayah adat Anim-Ha menyampaikan apresiasi kepada Panitia Penyelenggara yang melakukan terobosan pada proses Musrenbang Otsus yang disebutnya lebih terbuka dalam hal penyusunan usulan kegiatan. “Beda sekali dengan tahun ini. Sekarang kita pakai *in-focus* menayangkan hasil isian aplikasi di layar. Jadi kelihatan usulan kita lebih detil tujuannya, indikatornya dan peruntukan anggarannya. Kita juga bisa terbuka saling berdiskusi,” ungkap Andre perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi.

Bappeda Provinsi Papua selaku penyelenggara kegiatan menyadari bahwa inovasi memang selalu memiliki tantangan, khususnya keterbatasan jaringan internet. Namun, hal itu tidak mengendurkan mimpi mereka agar Papua bisa terus bergerak maju mengejar ketertinggalan. Menurut salah seorang Panitia dari Bappeda

Papua, sejumlah kegiatan penguatan kapasitas bagi perwakilan Bappeda kabupaten/kota telah dilakukan untuk memantapkan persiapan pelaksanaan Musrenbangsus, meskipun diakui belum maksimal karena keterbatasan SDM. “Sebenarnya aplikasi kita sudah bagus dan kita sudah panggil mereka ke Jayapura untuk sosialisasi pengisian aplikasi ini. Masalahnya, kita sering terkendala jaringan internet, dan SDM Operator di tingkat kabupaten belum merata pemahamannya,” jelas Mirwan Gani, Staf Bappeda Provinsi Papua yang juga bertindak selaku Tim Pembahas.

Bappeda Provinsi Papua mengakui bahwa Aplikasi E Papua Pu Musrenbang (*E-Planning*) masih perlu ditinjau kembali untuk dapat mengakomodasi kebutuhan kegiatan yang bervariasi dari kabupaten/kota serta memperbaiki aspek teknis dan istilah yang digunakan dalam program agar lebih fleksibel dapat dipilih oleh kabupaten dan kota. Implikasinya perlu tambahan kegiatan pengembangan program Papua Pu Musrenbang dalam RKPD Bappeda Papua yang diharapkan dapat selesai tahun 2018 akhir, untuk dapat digunakan awal tahun 2019 bersamaan dengan persiapan penyusunan RPJMD yang baru.

Bukan hanya inovasi dari segi penerapan sistem aplikasi perencanaan (E Papua Pu Musrenbang), namun juga terjadi perbaikan pada tahapan pelaksanaan. Prosesi pembukaan tidak lagi monoton sebagaimana biasanya dengan formalitas ala birokrasi, namun juga mulai diselipi selingan hiburan ringan dan tayangan film berjudul Tong Pu Papua yang mendokumentasikan pemanfaatan dana otonomi khusus, juga dinding ruangan pertemuan yang dihiasi foto-foto tentang Papua dengan segala potensi sumber dayanya. Serta tentunya penataan ruangan pada sesi pembahasan yang memungkinkan semua bisa saling berinteraksi dengan terbuka, didukung oleh ketersediaan fasilitas *sound system* dan daya dukung sarana kelistrikan yang cukup.

Inovasi lainnya yang muncul adalah ketersediaan waktu yang cukup bagi setiap delegasi kabupaten untuk memaparkan usulan rencana defenitifnya dengan tanggapan dari para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) Provinsi sesuai bidang masing-masing. Hal ini berimplikasi pada makin jelasnya poin-poin perbaikan bagi setiap SKPD pengusul. Demikian pula, setiap OPD/SKPD kabupaten lebih siap menghadirkan dokumen yang dibutuhkan.

Dalam rangka memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan Musrenbang Otsus Papua, Bappeda Papua mengeluarkan panduan pelaksanaan.

Dengan adanya buku panduan tersebut, diharapkan bahwa pelibatan dalam pembahasan lebih mengarah kepada konsistensi, efisiensi dan produktifitas. Selain hal tersebut, peran kendali harus dilakukan, sehingga membatasi keleluasaan dari pengusul. Konsentrasi terhadap usulan pembahasan adalah yang sesuai dengan peruntukan pelaksanaan pembangunan otonomi khusus melalui program dan kegiatan yang telah terintegrasi pada aplikasi e-Musrenbang.

Salah satu terobosan bagus pada pelaksanaan Musrenbangsus Papua adalah pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil yang selama ini telah menjadi mitra pembangunan Papua dalam pendampingan persiapan dan pelaksanaan Musrenbangsus, sehingga pelaksanaannya dapat lebih tertata dan terukur. Selain itu juga dapat membantu menemukan praktik baik dan tantangan yang dapat menjadi rekomendasi perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

Mengapa ada Musrenbangsus Papua

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Provinsi Papua digelar dari tanggal 21-24 Mei 2018 secara simultan di 3 kabupaten yakni di Jayapura untuk wilayah adat Mamta dan Lapago, Merauke untuk wilayah adat Anim-Ha dan Biak untuk wilayah adat Saireri dan Meepago.

Gubernur Papua dalam sambutan pembukannya yang dibacakan oleh Sekretaris Bappeda Papua pada pembukaan Musrenbangsus di Kabupaten Merauke (21/5) menyampaikan bahwa dana otonomi khusus telah memberikan perubahan yang signifikan, tapi di sisi lain masih ada yang tertinggal. Hal ini terkait tantangan geografis dan luasnya wilayah, sehingga anggaran terbesar masih tersedot pada pembiayaan kegiatan infrastruktur.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) merupakan proses perencanaan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kampung sampai ke tingkat nasional. Pada proses tersebut penentuan arah kebijakan dan prioritas program, sasaran serta besaran alokasi dana menjadi hal utama yang dibahas dalam Musrenbang.

Untuk kontekstual Papua dengan banyaknya jenis, jumlah dan skema pendanaan yang ada, perencanaan yang terintegrasi (antar jenis pendanaan) serta tingkat kerincian masing-masing pendanaan menjadi kunci keberhasilan program yang didanai tersebut. Salah satu sumber dana yang penting adalah dana otonomi khusus (otsus) yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 2% dari DAU Nasional. Pada tahun 2018 ditambah dengan dana

tambahan otonomi khusus bagian infrastruktur nilai yang diterima lebih kurang sebesar 8 Triliun rupiah, lebih dari setengah APBD Provinsi Papua. Dengan demikian sejak tahun 2017 Pemerintah Provinsi Papua berinisiatif menyelenggarakan Musrenbang Otsus untuk mempersiapkan dengan baik pengalokasian dana otsus sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur otonomi khusus Papua.

Beberapa prioritas kegiatan dan dapat didistribusikan secara lebih merata sesuai kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat adat di Papua juga sangat diperlukan dalam memprioritaskan kegiatan-kegiatan pada proses Musrenbang ini. Demikian juga halnya dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota masing-masing sesuai dengan tanggung jawab serta aturan yang berlaku.

Pendekatan Wilayah Adat

Pelaksanaan Musrenbang Otsus Papua tahun 2018 menggunakan pendekatan berdasarkan 5 wilayah adat.

- 1 Wilayah adat Anim-Ha meliputi : Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digul.
- 2 Wilayah adat Mamta meliputi : Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya.
- 3 Wilayah adat Lapago-1 meliputi : Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara untuk wilayah Adat Lapago-2 meliputi : Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya.
- 4 Wilayah adat Saireri meliputi : Kabupaten Biak, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Waropen.
- 5 Wilayah adat Meepago meliputi : Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiay, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 telah menjadi perencanaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan Otsus. Mempertimbangkan signifikansi dana Otsus dan dana tambahan otonomi khusus bagian intrastruktur terhadap pembangunan Papua maka



diperlukan pelaksanaan Musrenbang Otsus yang terpisah dari Musrenbang reguler yang dilaksanakan secara tahunan.

Perencanaan dana Otsus berbasis spasial kiranya akan sangat berguna jika dilakukan berdasarkan pembagian wilayah adat. Pendekatan ini merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi Papua dan sangat bermanfaat untuk Provinsi Papua terutama agar mudah digunakan sebagai referensi perencanaan tahun berikutnya sehingga dapat juga dipublikasikan melalui internet sebagai bagian dari proses akuntabilitas.

Berdasarkan pada pendekatan wilayah adat, maka pelaksanaan Musrenbang Otsus mengikuti prosedur sebagai berikut : Pertama, mengenali persoalan utama masing-masing masyarakat adat dan wilayah pembangunan Papua adalah hal yang penting. Kedua, selanjutnya dapat diidentifikasi kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat adat untuk menyelesaikan permasalahan utama

BANG OTSUS DI 5 (LIMA) WILAYAH ADAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

Tema

Kualitas Hidup Orrang Asli Papua Ya Beradila



Foto : N.J. Tangkepayung/ Yayasan BaKTI

tersebut. Ketiga, dengan kumpulan kebutuhan tersebut dapat ditentukan arah pembangunan untuk masing-masing wilayah sehingga misalnya dapat ditentukan alokasi dan subsidi untuk sektor kesehatan dan pendidikan yang masih perlu dalam skala yang masih cukup besar di Asmat dan sebagian besar kelompok masyarakat di wilayah adat Anim-Ha. Keempat, untuk mendukung pengembangan ekonomi di wilayah adat Mamta misalnya, pengembangan sektor industrinya sudah mulai dapat dikembangkan lebih jauh untuk menyerap produksi yang disediakan oleh sektor pertanian. Demikian juga halnya dari sektor perikanan dan kelautan yang berada di wilayah adat Saireri. Namun kesemuanya perlu diperlengkapi dengan penanganan keamanan (laut dan darat), serta pemantauan cuaca yang lebih tangguh. Kelima, kemudian jika memang benar misalnya ditemukan dan penduduk setempat merasakan bahwa tingkat IPM di

kelompok wilayah adat Meepago dan Lapago masih rendah maka diperlukan investasi di sektor pendidikan yang lebih besar dibandingkan di kelompok wilayah adat Saireri dan Mamta.

Seluruh langkah di atas telah sesuai dengan Perdasus 13/2016 dan Perdasus 25/2013 bahwa alokasi dana harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten. Sehingga jika ada kegiatan perikanan di Wamena maka perikanan daratlah yang dimaksud, tidak seperti perikanan di Biak Numfor yang berorientasi pada perikanan laut. Prinsipnya sektor prioritas haruslah mendapatkan prioritas utama.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Musrenbang Otsus Papua, hubungi info@bakti.or.id



Melayani Rakyat melalui Gerakan SoBAT

Oleh **ASRI SAMSU & YUDI WIJANARKO**



Foto : ASRI SAMSU & YUDI WIJANARKO

Sanitasi khususnya sub sektor air limbah domestik, menjadi urusan pemerintahan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Regulasi yang mengatur hal ini adalah Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Air limbah domestik termasuk kategori Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedua regulasi yang melindungi layanan air limbah domestik sudah demikian kuat.

Namun implementasi layanan air limbah domestik masih jauh panggang dari api. Sarana yang telah dibangun pun kemudian masih banyak yang tak terpakai.

Hingga saat ini, masih sedikit kepala daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki layanan air limbah domestik secara integratif, multi aspek dan dari hulu ke hilir. Layanan air limbah domestik integratif dilaksanakan oleh banyak Organisasi Pemerintah Daerah dengan tugas dan fungsi terkait. Layanan juga dilakukan sejak dari hulu dengan melakukan perbaikan/pembangunan sarana, dilakukan penyedotan lumpur tinja, pengangkutan hingga pembuangan dan pengolahan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berjalan. Dalam layanan tersebut, semua rantai berfungsi. Berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.



Foto : ASRI SAMSU & YUDI WIJANARKO

Sayangnya layanan yang berjalan masih bersifat parsial. Akibatnya pelayanan berkelanjutan agar warga memiliki sanitasi yang layak masih belum dapat mencapai harapan.

Gerakan SoBAT

Di tengah kondisi itu, sebuah gerakan yang dilakukan Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan, Andi Kaswadi Razak beserta jajarannya. Pada tanggal 17 Agustus 2017, Bupati Kaswadi mengumumkan dimulainya sebuah gerakan bernama Gerakan SoBAT (Soppeng Bebas Ancaman Tinja). Gerakan SoBAT selama satu tahun sejak peluncurannya akan bertugas menuntaskan 6.108 Kepala Keluarga tanpa akses sanitasi atau masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Tak hanya itu, Gerakan SoBAT juga menargetkan untuk meningkatkan akses layak sanitasi Kabupaten Soppeng, yang saat ini masih 39 persen.

“Gerakan SoBAT harus mampu menghapus angka BABS pada tahun 2018. Kami bertekad akan lebih cepat dari target Nasional. Kalau target o BABS Nasional tahun 2019, kami akan bisa capai di tahun 2018. Semua bisa, asal kita mau,” tekad Kaswadi.

Dikatakan Kaswadi, Gerakan SoBAT akan menggerakkan semua rantai layanan dan melibatkan para pihak, baik jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pihak swasta dan masyarakat. Tekad gerakan SoBAT adalah membangun dan merehabilitasi jamban dan *Septic Tank* yang layak, melakukan identifikasi

dan pengecekan kelayakan *septic tank* rumah tangga, perkantoran dan fasilitas masing-masing dan melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala. Gerakan SoBAT juga akan memaksimalkan pengolahan lumpur tinja serta memaksimalkan proses STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Bagaimana SoBAT bisa dijalankan?

Bupati Kaswadi mengeluarkan Instruksi Bupati No.3403/KDS/VIII/2017 Tentang Pelaksanaan Gerakan Soppeng Bebas Ancaman Tinja (SoBAT). Instruksi Bupati Soppeng berisi beberapa poin, di antaranya penekanan kerja bersama semua Pihak terutama institusi Pemerintah. Terdapat pembagian kerja termasuk koordinasi, pelaksanaan pembangunan fisik, pelaksanaan STBM, dan Pengelolaan Lumpur Tinja Terjadwal. Instruksi Bupati ini juga mewajibkan kepada kepala OPD, para pejabat, dan pegawai untuk mengecek dan merehabilitasi serta membangun jamban mereka yang kemudian disedot secara terjadwal sehingga menjadi contoh konkrit bagi masyarakat.

Implementasi Gerakan SoBAT

Untuk menyukseskan gerakan SoBAT, Pokja Sanitasi Kabupaten Soppeng melakukan Sosialisasi program kepada seluruh *stakeholders* masyarakat dan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Sosialisasi juga dibarengi dengan verifikasi jumlah masyarakat yang belum memiliki akses jamban dengan mengumpulkan sanitarian, kader desa, Pegawai Puskesmas, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Hasil verifikasi tersebut mendapatkan data baru. Dari data awal sebanyak 6.108 Kepala Keluarga (KK) dari verifikasi yang dilakukan data terbaru turun menjadi 4.750 KK masyarakat di Kabupaten Soppeng masih BABS. Data itu tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Verifikasi dilakukan kembali seiring dengan kebutuhan data untuk program Air Limbah Setempat (ALS) APBN 2017. Data terkini menyebut, angka BABS di Soppeng sebanyak 4.419 KK.

Sesuai Instruksi Bupati, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Pokja Sanitasi melakukan langkah awal dengan menitikberatkan pada penuntasan BABS. Hal ini ditujukan sebagai tekad untuk Soppeng Bebas BABS di tahun 2018. Untuk menunjukkan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menganggarkan penuntasan 663 KK pada APBD Perubahan Tahun 2017.

Di samping melakukan langkah teknis, upaya non teknis juga dilakukan Pokja untuk mempercepat mencapai tujuan. Langkah tersebut adalah advokasi dengan melakukan Deklarasi 9 Desa yang telah Bebas BABS atau ODF (*Open Defecation Free*). Deklarasi dilakukan tanggal 4 Desember 2017 di Tanrajeng, Desa Marioritenga, Kec. Marioriwawo. Pemilihan Desa Marioritenga ini juga merupakan langkah yang direncanakan Pokja sebagai desa percontohan. Desa tersebut memiliki Peraturan Desa tentang Kewajiban Kepemilikan Jamban. Pada Deklarasi tersebut, ada dua agenda penting yang dilakukan yaitu deklarasi 9 Desa dan Pembacaan Komitmen dan Janji Kepala Desa dan Lurah di hadapan Bupati Soppeng untuk melakukan upaya dalam menuntaskan kepemilikan jamban di Kabupaten Soppeng di tahun 2018.

Bupati Soppeng pada Deklarasi Tanrajeng tersebut menekankan akan memberikan *reward* kepada Kepala Desa/Kelurahan yang berhasil dan juga memberikan pernyataan keras tentang *punishment* berupa menurunkan jabatannya dari Lurah apabila tidak berhasil menuntaskan akses sanitasi masyarakat yang dipimpinnya sebelum 1 Januari 2019.

Deklarasi Tanrajeng mengubah skenario penuntasan BABS. Jika semula jumlah BABS akan diselesaikan seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten, di Tanrajeng berubah menjadi urusan bersama dan dibagi beberapa pihak. Sebanyak

2.368 KK akan diintervensi dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, organisasi-organisasi kepemudaan, dan organisasi lainnya serta masyarakat itu sendiri di tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan menyelesaikan sisanya sebesar 1.603 KK melalui dana DAK dan Hibah ALS tahun 2018.

Layanan Lumpur Tinja Terjadwal

Gerakan SoBAT ditekankan sebagai sebuah gerakan nyata dan kerja bersama yang menggerakkan semua mata rantai layanan. Hal itu dibuktikan lagi oleh Bupati Soppeng dengan meluncurkan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Peluncuran dilaksanakan tanggal 27 Maret 2018, yang dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Team Manager Urban Sanitation Development Program (USDP).

Sebelum LLTT dilakukan, Pokja Sanitasi telah melakukan persiapan teknis dan non teknis. Tahapan penting persiapan itu adalah data calon pelanggan LLTT. Data tersebut diperoleh melalui pendataan kepemilikan tangki septik Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pengisian *Form Online* SoBAT. Pendataan online menghasilkan data 2.272 ASN yang akan menjadi pelanggan awal layanan.

Sebelum melayani pelanggan hasil pendataan, penyedotan untuk program LLTT ini akan menyedot tangki septik di rumah 44 Kepala OPD dan Eselon 2. "ASN harus menjadi contoh gerakan ini. Jangan kita menyuruh masyarakat tapi kita tidak memberi contoh," tegas Bupati.

Kabupaten Soppeng dengan dipelopori Bupati Kaswadi terus bergerak. Penyedotan terjadwal dengan segala keterbatasan teknis, SDM serta sarana penyedotan telah dilakukan sejak bulan Mei yang lalu.

Namun demikian, keterbatasan bukanlah halangan melayani. Sebagaimana ditandaskan Bupati, semua bisa selama kita mau. Soppeng telah membuktikan itu!

INFORMASI LEBIH LANJUT

Asri Samsu adalah anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Soppeng dan Yudi Wijanarko, PROSDA USDP Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis dapat dihubungi via email tenroaji@gmail.com (Asri Samsu) dan ydwijanarko@yahoo.com (Yudi Wijanarko).

Puskesmas di Batas Negara

Oleh **N.J. TANGKEPAYUNG**

Puskesmas yang berdiri sejak 2008 ini melayani pemeriksaan dan pelayanan kesehatan masyarakat empat kampung yaitu Kampung Kombut, Mokbiran, Kawangtet dan Amuan serta melayani masyarakat dari luar distrik bahkan masyarakat yang berdiam di wilayah Papua Nugini pun datang untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Mengunjungi Puskesmas Kombut di perbatasan Negara Republik Indonesia dan Papua Nugini ini adalah kesempatan berharga. Selain sulit untuk sampai ke sana kunjungan ini memberikan pandangan baru bagaimana sebuah pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang terpencil di perbatasan negara, mampu bertransformasi menjadi puskesmas terbaik, sekaligus tempat pelayanan kesehatan pilihan masyarakat di perbatasan bukan saja masyarakat dari wilayah Indonesia tetapi juga oleh penduduk di wilayah perbatasan Negara Papua Nugini.

Tempat Bersejarah

Nama Boven Digoel berasal dari Bahasa Belanda yang berarti Daerah Digul Atas. Merupakan tempat bersejarah pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Boven Digoel menjadi tempat pengasingan baru untuk mengganti pengasingan ke luar negeri oleh Belanda waktu itu. Pada Tahun 1934 Bung Hatta bersama Sutan Sjahrir, Mohamad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sumitro, dan Moerwoto diasingkan disini.

Saat ini untuk mengenang lokasi bersejarah ini, sebuah monumen Patung Bung Hatta berdiri kokoh dekat kompleks Penjara Tua Boven Digoel tepat di depan Kantor Polres Boven Digoel dan bersebelahan dengan Lapangan Terbang di Kota Tanah Merah.



Foto: N.J. Tangkepayung / Yayasan Bakti

Kabupaten Baru

Kabupaten Boven Digoel merupakan kabupaten baru yang dibentuk dari pemekaran Kabupaten Merauke, bersama dengan kabupaten lain di Selatan Papua seperti Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi pada Tahun 2002. Terdapat 20 distrik di Boven Digoel dengan 112 kampung di wilayah dengan luas sekitar 27 ribu kilometer persegi.

Terletak di daerah Selatan di Pulau berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang di Utara, di Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merauke, di Barat berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan di Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini.

Populasi penduduk sekitar 63.020 jiwa menurut Dinas Komunikasi dan Informasi Boven Digoel Tahun 2016. Sebagian besar penduduk adalah suku asli yang mendiami daerah Selatan Papua sejak dahulu yaitu Suku Mandobo, Muyu, dan Auyu yang mewarisi karakter suku-suku di Selatan Papua. Ada juga pendatang yang telah lama bekerja dan berbaur dengan masyarakat setempat dari daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku.

Jalan Berlumpur

Perjalanan menuju Distrik Kombut dimana Puskesmas Kombut berada dimulai dari Jayapura ibukota Provinsi Papua menggunakan Pesawat ATR 42-300 yang berangkat dari Bandar Udara Sentani. Membutuhkan waktu 40 menit untuk tiba di Bandar Udara Tanah Merah di Boven Digoel. Selain dengan pesawat bermesin turbo-prop ganda ini, ada pesawat bermesin turbo-prop tunggal seperti *Cessna Grand Caravan* yang juga terbang dari Jayapura ke Tanah Merah ibukota Kabupaten Boven Digoel.

Kota Tanah Merah juga dapat dicapai dari Kota Merauke melalui jalan Trans Papua sisi selatan dengan jarak tempuh 490 kilometer dan ditempuh dalam waktu 8 jam. Waktu tempuh ini lebih singkat bila dibandingkan beberapa tahun lalu saat ruas Jalan Trans Papua ini belum diperbaiki. Menurut Pak Bowo, supir yang lama melayani jalur ini, kita bisa tidur di jalan karena kondisi jalan yang betul-betul rusak parah dengan kubangan bekas lalu-lalang kendaraan mencapai 2 meter dalamnya apa lagi bila datang musim hujan.

Begitu pula 70 kilometer ruas jalan Tanah Merah ke Kombut yang melewati Mindiptana, 20 kilometer pertama jalan beraspal mulus bahkan beberapa kilometer dalam balutan *asphalt hot mixed*. Lepas dari Mindiptana, jalanan mulai berubah dari jalan aspal ke jalan dengan

pengerasan dan memasuki daerah Kombut jalanan benar-benar berupa jalan tanah berlumpur dengan sesekali menyeberangi jembatan kayu di atas sungai-sungai kecil hingga tiba di Kampung Kombut.

Kondisi jalan yang berlumpur jika tidak beraspal ini disebabkan tidak adanya mineral bebatuan keras alami di daerah ini yang dapat menopang struktur jalan, sehingga jalan menjadi sangat liat berlumpur jika hujan. Ini adalah ciri khas daerah Selatan terutama di sekitar Kota Tanah Merah karena didominasi oleh Tanah Podsolik merah kuning yang berwarna kekuningan atau kemerahan, mungkin inilah sebabnya nama Kota Tanah Merah berasal.

Pelayanan Kesehatan di Kombut

Distrik Kombut di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini ini seluas sekitar 660 kilometer persegi dan dipimpin oleh seorang Kepala Distrik bernama Yustina Warum. Sebagai seorang kepala distrik terluar, ibu Yustina yang berasal dari Suku Muyu ini memikul tanggung jawab yang besar. Bayangkan saja di distrik yang terdiri dari empat kampung ini belum tersedia jaringan listrik 24 jam. Walaupun sinyal telepon seluler telah menjangkau daerah perbatasan ini, namun masih terbatas hanya untuk komunikasi telepon dan pesan singkat saja.

Kabupaten Boven Digoel memiliki dua Rumah Sakit pemerintah yang terletak di Ibukota Tanah Merah dan Distrik Mindiptana, juga ada 20 Puskesmas yang tersebar di distrik-distrik sebagai garda depan pelayanan kesehatan.

Kembali kepada pelayanan kesehatan, saat ini Puskesmas Kombut adalah satu Puskesmas dengan pelayanan dan pengelolaan terbaik di Kabupaten Boven Digoel. Predikat yang tidak mudah didapatkan bagi sebuah Puskesmas yang terletak di area perbatasan negara, terpencil, dan memiliki kondisi geografis yang sulit.

Ibu Nurhayana, perawat yang telah mengabdikan tiga tahun di Kombut berkisah tentang suka duka perjalanan ke dan dari lokasi Puskesmas. Membutuhkan waktu lima sampai enam jam tergantung kondisi jalan yang berlumpur. Perawat yang akrab disapa Anna dan rekan-rekan sejawatnya harus berkendara motor roda dua bersama jika harus turun ke Tanah Merah untuk keperluan pribadi atau urusan dinas di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel. Hal ini mereka lakukan agar dapat saling menolong jika salah satu motor yang mereka kendari terperosok kedalam lumpur atau mogok karena banjir di jalan.



Foto : N.J. Tangkepayung / Yayasan BaKTI

Satu sosok di balik Puskesmas Kombut ini adalah Kepala Puskesmas Kombut, Bapak Adolof Andatu. Pria asal Kampung Maribu di Jayapura ini menceritakan perjalanannya mengabdikan daerah yang penuh tantangan. Mulai dari kisah tersesatnya di hutan saat berjalan kaki dua hari dua malam dari Distrik Koroway ke Kombut hingga menerima penghargaan sebagai Puskesmas dengan pelaporan manajemen terbaik se-Kabupaten Boven Digoel.

Saat tulisan ini dibuat ada anak-anak muda bersemangat sedang bertugas di Puskesmas Kombut, mereka adalah Benaria Gea, Ayu Yahyakusuma, Dita Kurniasari, Dwi Ningsih, Christina Patongli dan Yoga Irwanutama. Bergabung dalam tim Nusantara Sehat yang bertugas di Puskesmas Kombut menjadi tantangan sekaligus kebanggaan bagi mereka. Saat ditanya apakah betah di Kombut, hampir semua sepakat menjawab kalau mereka betah mengabdikan di Puskesmas Kombut. Hal ini kemudian kami konfirmasi kepada Pak Adolof di tempat terpisah dan beliau mengiyakan, bahkan beberapa diantara mereka belum mengambil jatah cutinya.

Selama menjadi pelayan kesehatan masyarakat, Pak Adolof telah melalui banyak pengalaman

menaklukkan tantangan alam, mengingat perjalanannya yang harus masuk keluar hutan dan menyeberangi sungai-sungai besar di sana. “Saya pernah tidur di hutan dengan staf saya karena tersesat sehingga kami membangun bivak (semacam pondok dari daun palem hutan)” tutur alumnus Program Diploma Politeknik Kesehatan Jayapura ini.

Memimpin 22 tenaga medis dan administrasi di sebuah Puskesmas pedalaman bukanlah perkara mudah bagi Pak Adolof. Puskesmas yang berdiri sejak 2008 ini melayani pemeriksaan dan pelayanan kesehatan masyarakat empat kampung yaitu Kampung Kombut, Mokbiran, Kawangtet dan Amuan serta melayani masyarakat dari luar distrik bahkan masyarakat yang berdiam di wilayah Papua Nugini pun datang untuk mendapatkan layanan kesehatan atau sekedar mengunjungi sanak saudaranya yang terpisah wilayah negara.

Peningkatan Tata Kelola

Sejak awal Tahun 2017 Program KOMPAK-LANDASAN II yang merupakan bagian dari Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia

untuk peningkatan layanan dasar dimulai di Kabupaten Boven Digoel. Distrik Jair, Mandobo dan Kombut dipilih sebagai lokasi program ini. Salah satu aspek layanan dasar yang didukung oleh program ini adalah pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas sebagai layanan garis depan.

Berawal dari mengikuti pelatihan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Puskesmas, Adolof Andatu dan beberapa orang staf senior Puskesmas Kombut mulai mengikuti beberapa pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan puskesmas yang diselenggarakan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Tak menunggu lama untuk melihat dampaknya, Pak Adolof menceritakan perubahan yang terjadi di Puskesmas Kombut yang dipimpinnya.

Mulai dari pemanfaatan data yang akurat dalam manajemen Puskesmas hingga data *up to date* kampung seperti berapa jumlah rumah tangga yang belum memiliki jamban keluarga atau berapa keluarga yang belum memiliki rumah tinggal sendiri atau masih menumpang pada sanak keluarganya. Sistem Administrasi Informasi Kampung atau SAIK yang dikembangkan di empat kampung di Distrik Kombut oleh Program KOMPAK-LANDASAN II sangat membantu Pak Adolof dan para petugas kesehatan dari Puskesmas Kombut dalam mengumpulkan data yang akurat yang sebelumnya tidak tersedia.

Musyawarah Kampung yang membahas pemanfaatan Dana Desa di empat kampung Distrik Kombut juga telah mengalokasikan anggaran desa untuk kesehatan seperti pembuatan jamban keluarga dan dukungan bagi pemberian makanan tambahan bagi balita yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Puskesmas.

Integrasi program kampung dan kesehatan menggunakan Dana Desa di Kampung Kawangtet dan Kampung Mokbiran dialokasikan oleh pemerintah kampung untuk pemberian makanan tambahan kepada Balita dan Lansia setiap tanggal 15 tiap bulan di Kampung Mokbiran dan setiap tanggal 21 di Kampung Kawangtet. Program Puskesmas Keliling (Pusling) ke kampung-kampung dilakukan secara terjadwal dengan memanfaatkan data SAIK dan hasil monitoring berat badan bayi untuk Pemberian Makanan Tambahan (BMT) disertai pembagian kelambu anti nyamuk Malaria.

Health Specialist Program KOMPAK-LANDASAN II, Julia Ch. Sagala menjelaskan langkah-langkah peningkatan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas yang telah dilakukan bekerjasama dengan Dinas

Kesehatan di tingkat Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel.

Dimulai dengan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan SOP Puskesmas agar Puskesmas dapat mengukur kinerjanya dalam ketepatan program dan waktu pelayanan. Kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) dan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan *Plan of Action* (PoA) Puskesmas Boven Digoel yang menghasilkan peningkatan keterampilan petugas Puskesmas dalam menyusun perencanaan tingkat Puskesmas yang terpadu dan terintegrasi. *Draft* dokumen PTP terpadu Tahun 2019 Puskesmas Kombut telah tersedia sebagai salah satu keluaran dari pelatihan ini.

Pelatihan Manajemen Puskesmas juga diberikan kepada kepala Puskesmas dan staf dalam rangka meningkatkan manajemen Puskesmas yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai akreditasi Puskesmas. Rangkaian pelatihan ini juga disertai dengan pendampingan yang dilakukan juga oleh Koordinator Kabupaten Boven Digoel dan Koordinator Distrik Kombut yang bekerjasama dengan kader kampung di sana.

Pak Adolof saat ini tergabung dalam tim pendampingan akreditasi untuk Kelompok Kerja UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) Kabupaten Boven Digoel. Beliau sering keluar masuk hutan meninggalkan Puskesmas untuk mendampingi dan berbagi pengetahuan dengan Puskesmas lainnya mengenai manajemen Puskesmas. Ada kalanya kepala Puskesmas lain berkunjung ke Puskesmas Kombut, seperti belum lama ini dia dikunjungi kepala Puskesmas Minati dan Kombay.

Puskesmas Kombut adalah satu contoh dari praktik peningkatan kualitas tata kelola layanan dasar bidang kesehatan masyarakat di Papua. Semoga dengan berjalannya proses saling belajar yang dilakukan oleh Pak Adolof, para kepala puskesmas dari distrik lain dan pendampingan dari Dinas Kesehatan melalui tim akreditasi daerah, akan membawa dampak perbaikan mutu layanan dasar kesehatan di tingkat Puskesmas di wilayah yang lebih luas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN II, hubungi info@bakti.or.id



Semangat Membangun Masa Depan Anak Bangsa

Oleh **NOVI ARIYANTO**

Perjalanan menuju sekolah sasaran program Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) di Desa Sekais, salah satu desa terpencil di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Panorama alam yang indah, pepohonan yang tumbuh rindang di atas bukit-bukit di sisi kiri dan kanan sepanjang jalan. Jalan menuju ke desa ini, dilalui dengan beberapa tanjakan dan penurunan yang tajam lagi lincin apabila hujan, ditambah dengan jalan tanah yang masih polos tanpa *make up* alias tanah kuning, karena itu jalanan menjadi berlumpur dan becek di setiap kubangan, tidak jarang mobil yang ditumpagi pun terjebak dalam lumpur yang dalam dan akhirnya amblas.



Foto : **Abdurrahman / Yayasan BaKTI**

Begitu mobil amblas, masih ada alternatif untuk tetap melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan roda dua milik warga sekitar. Perjalanan pun dilanjutkan, namun belum setengah perjalanan tiba-tiba menemukan tantangan yang lebih menegangkan yaitu ketika menyeberangi sungai yang jembatannya sudah darurat dan tidak layak pakai lagi, jembatan yang terdiri dari kayu bulat dan lapuk dimakan usia harus dilalui dengan penuh kehati-hatian.

Usai menyeberangi sungai, rintangan lain tak terelakkan datang menghampiri. Satu motor yang ditumpangi mogok sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan, sedangkan dua motor lainnya terus menerobos untuk sampai ke lokasi tujuan. Inilah sepenggal cerita petualangan yang dialami Tim Koordinasi Daerah (TKD) Program

Seketika rasa lelah terobati ketika melihat anak-anak sedang belajar dengan semangat.

KIAT Guru Kabupaten Landak saat menempuh perjalanan untuk misi monitoring ke sekolah dampingan KIAT Guru di desa Sekais. Tim yang terdiri dari Bappeda Kabupaten Landak yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Bappeda Samsul Bahri, turut ikut serta Kabid Sosbud Y.Nomensen beserta dua orang staf dan didampingi dua orang tim pelaksana daerah KIAT Guru.

Semangat Tim Monitoring dalam menempuh perjalanan yang penuh tantangan itu didasari rasa penasaran untuk melihat secara langsung perubahan yang terjadi di sekolah dengan adanya intervensi program KIAT Guru. Kunjungan monitoring ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 April lalu dan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak sekolah. Setiba di SDN 22 Palo Belantian sekitar pukul 10.19 WIB, kondisi sekolah terlihat sepi di mana tak seorang pun anak yang berada di luar kelas. Kemudian barulah salah satu guru dan kepala sekolah menyambut rombongan. Tanpa basa-basi rombongan langsung mengecek ruangan kelas yang hanya terdiri dari tiga ruangan itu, ternyata anak-anak sedang belajar di kelas masing-masing. Sekalipun mereka berada dalam kelas yang sempit karena satu ruangan disekat menjadi dua kelas, namun anak-anak tetap belajar tenang tanpa mengganggu kelas lainnya. Seketika rasa lelah terobati ketika melihat anak-anak sedang belajar dengan semangat.

Usai kunjungan ke kelas, rombongan kemudian diarahkan menuju ruang kantor kepala sekolah. Di dalam ruangan, obrolan santai diawali dengan satu pertanyaan kepada pihak sekolah “Bagaimana dengan adanya program KIAT Guru selama ini pak ya?” Pak Ramli, Kepala Sekolah SDN

22 Palo Belantian dengan spontan dan tanpa beban menjawab dengan semangat, “Sejak ada program KIAT Guru, sekolah jadi hidup, masyarakat jadi peduli kepada anaknya.” Menurut Kepala Sekolah yang sudah menjabat 32 tahun ini, “Dulunya sekolah berjalan sendiri, masyarakat juga berjalan sendiri, tapi sekarang masyarakat mulai peduli dengan sekolah misalnya gotong royong dan sebagainya” tambahnya lagi.

Mendengar jawaban kepala sekolah, rombongan terpukau dan semakin penasaran dan lanjut bertanya, “Apa yang sudah dilakukan oleh sekolah?” Lalu pak Ramli menceritakan dengan panjang lebar bahwa beliau pada awalnya sangat terpaksa menerima program ini sebab sebelumnya sudah terbiasa dengan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) apa adanya. Misalnya, dulu guru hanya tiga orang mengajar di 6 kelas, dan jika tidak masuk beberapa hari tidak ada yang urus baik dari kabupaten maupun dari masyarakat sendiri, Namun setelah lama-kelamaan menjadi terbiasa dan mulai melakukannya dengan hati, motivasi semakin tumbuh dengan adanya perhatian masyarakat sekitar dan juga dari kabupaten.

Dari sinilah perubahan-perubahan kecil mulai dilakukan misalnya inisiatif penambahan guru di mana sebelumnya hanya bertiga dan setelah berjalan hampir dua tahun ini sudah ada tambahan 3 orang guru sehingga jumlah guru sekarang ini sudah 6 orang termasuk kepala sekolah yang terdiri dari 2 guru PNS dan 4 guru honorer. Selain itu, ruangan kelas sudah disekat yang dulunya satu ruangan dipakai oleh dua kelas tanpa sekat, saat ini hasilnya sudah terlihat misalnya anak kelas satu rata-rata sudah bisa membaca, ini perubahan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan bahkan pelajaran bahasa Inggris mulai diajarkan di kelas 5 dan 6. Tidak hanya itu, saat ini juga telah dikembangkan koperasi sekolah yang tujuannya untuk saling membantu kebutuhan internal guru dan sewaktu-waktu jika dana BOS belum cair, sesekali dana koperasi dipinjam untuk kebutuhan belanja sekolah dan diganti saat dana BOS cair, dan masih banyak program yang ingin dikembangkan, demikianlah pak Ramli mengakhiri ceritanya.

Tak lama kemudian kader datang dan langsung dipersilakan masuk ke ruangan untuk berdiskusi bersama tim monitoring. Tanpa panjang lebar, tim langsung bertanya kepada kader dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada pihak sekolah sebelumnya, lalu Kader dengan bangganya menceritakan perubahan yang



dirasakan selama ini baik terjadi di sekolah maupun di masyarakat. “Sekarang, kalau turun hujan dan jalanan licin, Pak Kepsek simpan motor di jalan kemudian berjalan kaki ke sekolah,” ujar Wehlemus, Kader Desa SDN 22 Palo Belantian. Lebih lanjut mengungkapkan atas inisiatifnya menggerakkan masyarakat bergotong royong yang rutin dilakukan pada tanggal 5 setiap bulannya. Gotong royong yang sudah dilakukan misalnya memperbaiki akses jalan yang dilewati anak-anak dan juga guru menuju sekolah, membersihkan lingkungan sekolah. “Saya selaku kader dan masyarakat tidak bisa memberikan bantuan materil, tapi bantuan tenaga selalu siap bergotong royong jika dibutuhkan sekolah,” tuturnya.

Tim monitoring memberikan apresiasi yang mendalam setelah mendengarkan cerita dari penyedia layanan (sekolah) dan pengguna layanan (masyarakat) juga telah melihat langsung secara natural, semua sudah terkonfirmasi dengan baik. “Itulah sebabnya mengapa kami tidak memberitahukan adanya kunjungan monitoring



Foto : Abdurrahman/Yayasan BaKTI

ke sekolah ini,” ungkap Pak Samsul selaku pimpinan rombongan. Kepala sekolah langsung memotong pembicaraan “Bagi sekolah tidak ada kekhawatiran dengan monitoring dadakan sebab kami sudah bekerja dengan hati, bahkan kami merasa terharu dan bangga ketika dikunjungi dari kabupaten yang sudah merasakan melewati medan sulit untuk melihat keberhasilan dan kekurangan kami, dan bukan berarti kami mencari perhatian, tapi adanya perhatian ini yang membuat kami terus termotivasi,” tutur Pak Ramli, sembari tersenyum lepas.

Pak Samsul Bahri, Ketua Tim Monitoring kemudian menyampaikan beberapa harapan yang perlu ditindaklanjuti di kabupaten berdasarkan pembelajaran dari monitoring ini diantaranya, rencana rehabilitasi perbaikan jembatan rusak yang merupakan akses jalan bagi anak sekolah dan juga rencana pelatihan-pelatihan untuk penguatan kapasitas dalam hal pengembangan sekolah misalnya menjadikan sekolah hijau dan sebagainya. “Untuk itu, saya menghimbau agar memperbanyak sosialisasi dengan masyarakat

untuk meningkatkan kerjasama,” imbuhnya. Hal senada diungkapkan Nomensen, Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Landak bahwa diperlukan pelatihan atau studi banding bagi sekolah yang berprestasi, baik kader, KPL maupun gurunya. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan rasa kebanggaannya atas sinergitas sekolah dan masyarakat yang sudah cukup bagus, sehingga beliau mengakui dan berkata, “Saya tidak sia-sia berkunjung kesini banyak pembelajaran yang didapatkan,” ungkapnya.

“Tanggung jawab yang dilakukan ini, bukan karena tunjangan khusus yang akan didapatkan, namun terlebih pada kepedulian yang harus tertanam di jiwa untuk memperhatikan anak-anak agar lebih baik belajarnya,” demikian pesan penutup Pak Nomensen.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KIAT Guru dapat menghubungi info@bakti.or.id



Foto : Mans Balawala/Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS)

Realitas Hidup dalam Bidikan Lensa Perempuan Kampung

Oleh **MANSETUS BALAWALA**

Bertempat di aula kantor Desa Dulitukan, sembilan perempuan kampung yang tergabung dalam kelompok buruh migran menggelar pameran foto setelah seminggu lamanya belajar *photo voice*. Meski mereka tergolong awam dengan hal ihwal mengoperasikan kamera, namun ternyata mampu menghasilkan foto dengan kualitas terbaik. Melalui foto ini, mereka bisa menyampaikan pesan kepada publik, terutama pengambil kebijakan tentang realitas hidup yang mereka alami.

Foto berceritera apa adanya. Tak halnya dengan tulisan yang bisa mengikuti emosi si penulisnya. Karena itulah sembilan perempuan kampung dari

tiga desa, Dulitukan, Tagawiti dan Beutaran Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur memilih menjadikan foto sebagai alat monitoring dan evaluasi partisipatif.

Sebelum terjun ke lapangan untuk mengambil gambar, mereka terlebih dahulu dibekali pelatihan selama lima hari tentang bagaimana mengoperasikan kamera digital, konsep dasar fotografi dan literasi visual dan juga cara berbagi cerita tentang isu-isu pekerja migran dan dampaknya.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) bekerja sama dengan Migrant Care Jakarta dibawa payung Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).

Kegiatan ini difasilitasi oleh *Photo Voice*, sebuah organisasi yang fokus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk memanfaatkan fotografi sebagai alat untuk menyuarakan isu-isu yang berdampak dalam kehidupan mereka. Organisasi ini bekerja erat dengan para mitra MAMPU untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mendidik, mengadvokasi, dan melakukan dialog tentang isu-isu yang berkaitan dengan pekerja migran dengan memanfaatkan metode fotografi partisipatif.

Meski baru pertama kali dilihat, antusiasme masyarakat untuk datang melihat pameran *Photo Voice* ini membludak. Sejak pagi mereka sudah memenuhi aula kantor desa sebagai ruang pameran. Mereka melihat foto demi foto yang dipajang di antara dua tali senar yang dibentang di area kiri kanan aula sebagai media untuk memasang foto.

Wakil Bupati Lembata kala itu, Viktor Mado Watun yang membuka pameran berharap agar kegiatan itu dapat menjangkau lebih banyak desa di Lembata.

Sementara Sekretaris Camat Ileape, Petrus Demong mengakui pentingnya kemitraan untuk memecahkan permasalahan dalam masyarakat. "Kami (pemerintah kabupaten) tidak dapat mengelola masyarakat kami sendirian. Masih banyak kekurangan dalam hal sumber daya manusia dan pendanaan. Oleh sebab itu, kami sangat menghargai kemitraan untuk pembangunan daerah pedesaan seperti ini. Kemitraan ini sesuai dengan peran pemerintah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan Kabupaten," kata Petrus sembari menjanjikan adanya keterbukaan untuk berdiskusi dan berbagi informasi di antara para pemangku kepentingan.

Hal berbeda disampaikan, Yogi Making, jurnalis portal berita *online* Flores Bangkit ini mengaku terkesan dengan foto-foto yang diambil oleh perempuan-perempuan desa tersebut.

"Hari ini mereka menunjukkan kepada saya bahwa kita tidak memerlukan kamera mahal untuk membuat foto yang baik. Kamera sederhana dapat menghasilkan gambar-gambar yang bermakna dan kuat. Gambar memberi kita 1001 makna,"ujarnya.

Beragam foto yang dipamerkan menceritakan banyak hal termasuk kisah sukses yang dialami perempuan ketika menjadi buruh migran. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa foto keberhasilan mereka dalam membangun rumah layak huni.

Kresensiana Teri misalnya, melalui fotonya ia mengisahkan suka duka menjadi ART (Asisten Rumah Tangga) migran. Perempuan yang kini

menjadi kader pemberdayaan TKI di Desa Bautaran ini mengaku pernah menjadi asisten rumah tangga migran selama kurun waktu 2011-2012. Kemiskinan di desanya menyebabkan perempuan sering kali tidak mampu menempuh pendidikan lebih tinggi dari sekolah dasar. Keinginan mendapat penghidupan lebih baik, menjadi alasan kuat dirinya merantau.

"Kalau merantau, ada uang untuk membangun rumah berdinding bata. Fakta itu bisa dilihat di kampung kami. Dinding jerami atau bata merupakan tanda nyata kehidupan warga sebelum dan sesudah merantau," ujar Kresensiana tentang foto yang dia hasilkan. Dengan keterampilan fotografinya, dia mampu menggunakan foto-foto jepretannya untuk program pemberdayaan yang ia lakoni.

Begitu halnya dengan Emiliana Wae Balawala (36), seorang ibu rumah tangga asal Desa Tagawiti. Ia mengaku kalau dirinya tak pandai menulis ataupun membaca. Kehidupan tetangga sekitar dia, dipenuhi cerita kemalangan dan keberhasilan menjadi TKI di luar negeri. Berangkat dari pengalaman tersebut, dia memutuskan bergabung di pelatihan *Photo Voice*.

"Dengan foto, saya bisa bercerita betapa susahnyanya desa kami dan bagaimana masyarakat harus menjadi TKI agar hidup lebih layak," kata Emiliana yang memamerkan karya fotonya berjudul "Anak yang Butuh Perhatian". Foto ini memperlihatkan bocah laki-laki yang berdiri di balik kerangka jendela rumah. Kata dia, sebagian besar anak dari orangtua TKI kurang mendapat pendidikan dan perhatian. "Wisuda merupakan prosesi istimewa. Bisa dikatakan itu hasil kerja keras dari bekerja di luar negeri," ungkap dia menceritakan salah satu fotonya yang memotret seorang wisudawan.

Ada lagi karya foto yang ditampilkan Martina Lipat, melalui fotonya tentang kacang tanah, ia bercerita tentang hasil bumi yang lekat dengan kehidupannya. Curah hujan yang sedikit biasanya membuat tanaman kacang tanah tidak bisa dipanen dengan sempurna. Ia mengatakan, perempuan memiliki keterampilan yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Mayoritas perempuan bekerja sebagai petani kacang-kacangan dan jagung. Selain itu, seorang ibu rumah tangga harus mengerjakan urusan domestik, seperti mengasuh anak, mencuci, mengangkat air, dan menjual hasil ladang. Kerja keras tersebut sering kali tidak menghasilkan, bahkan cenderung sia-sia.



Mulai dari Titik Nol

Sebelum pelatihan fotografi, ada rasa pesimisme dalam benak sembilan perempuan eks pekerja migran yang dipilih dari perwakilan tiga komunitas buruh migran. Makhlum tak satupun diantara mereka mampu mengoperasikan kamera *pocket digital* yang dibagikan. Yang terlihat hanyalah keraguan dan canda pesimisme diantara mereka. Namun rasa pesimisme itu perlahan sirna ketika lima hari lamanya mereka dilatih oleh komunitas *Photo Voice* Inggris yang diwakili Jane.

"Sebelum pelatihan ini saya tidak tahu apa itu gambar yang bagus. Saya pikir foto-foto itu tidak menarik, hanya cara untuk mengingat suatu peristiwa. Tapi setelah pelatihan, saya sadar, saya bisa menggunakan keterampilan ini untuk komunitas saya," tutur Mistinem dan diamini Theresia Tuto yang mengaku senang dan bangga bisa menggunakan kamera. Tuto menambahkan meski dirinya tidak pernah bekerja sebagai buruh migran, tapi bersyukur dipilih menjadi anggota

kelompok usaha buruh migran Sonata di Desa Dulitukan. Bersama anggota lain, ia membuat dan menjual keripik jagung. Ia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja seperti mendata anak-anak yang akan dibaptis, *retret* dan rekoleksi.

Dipamerkan di Event Nasional

Karya foto sembilan perempuan kampung tak hanya dipamerkan di desa. Karya mereka juga mengabrek Jakarta dan Jember. Di Jakarta, karya mereka diikuti dalam pameran foto di acara Konferensi Nasional Perempuan Inspirasi Perubahan Mei 2015 lalu. Sementara di Jember Jawa Timur, karya foto mereka dipamerkan di Balai Soetardjo, Universitas Negeri Jember, pada ajang Jambore Nasional Buruh Migran yang berlangsung November di tahun yang sama.

Di kedua *event* ini, selain hasil jepretan sembilan perempuan asal Lembata, juga dipamerkan pula foto hasil bidikan dari perempuan buruh migran Lombok-NTB.



Foto : Mans Balawala/Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS)



Kejujuran dalam berkarya yang membuat makna foto terasa berbeda. Setiap foto menceritakan keprihatinan dan harapan masyarakat di desa, penyumbang tenaga kerja Indonesia dan pekerja rumah tangga. Mereka berlatar belakang keluarga miskin, rata-rata berpendidikan sekolah dasar, dan ada yang berasal dari keluarga purna TKI. Mereka berasal dari Desa Darek Gerunung, Jonggat, Beutaran, Tagawiti, dan Dulitukan.

Dua Tahap

Pelatihan fotografi bagi perempuan buruh migran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama lebih terfokus pada dasar-dasar fotografi dan literasi visual (melek visual), teori dan praktik fotografi partisipatif untuk para staf mitra lokal, yang mencakup pemanfaatan fotografi untuk monitoring dan evaluasi. Tahap ini juga berfokus pada perencanaan implementasi fotografi partisipatif masa depan.

Beberapa foto karya perempuan kampung yang turut dipamerkan pada acara Konferensi Nasional Perempuan Inspirasi Perubahan Mei 2015 di Jakarta.

Sementara tahap kedua berfokus pada pelatihan untuk perempuan eks pekerja migran terkait cara menggunakan kamera digital, konsep dasar fotografi dan literasi visual dan juga cara berbagi cerita tentang isu-isu pekerja migran dan dampaknya. Kelompok ini kemudian menjadi *Community Watchers* (Pengawas Komunitas). Setelah itu dilakukan kunjungan lapangan ke komunitas oleh para pengawas untuk memperkenalkan isu-isu tentang pekerja migran kepada komunitas sehingga pihak lain dapat memahami dan bekerja sama mengatasi tantangan tersebut.

Langkah terakhir adalah dengan menunjukkan foto-foto yang diambil oleh para peserta kepada komunitas mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan isu-isu tentang pekerja migran kepada semua anggota komunitas sambil merayakan berakhirnya pelatihan. Semua anggota komunitas, termasuk para pejabat desa, kecamatan dan kabupaten serta jurnalis lokal menghadiri pameran tersebut.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis bekerja di Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) dan dapat dihubungi via email mans_motor@yahoo.co.id

Sosialisasi Efektif ala Sekber Asmat

Oleh **SYAIFULLAH**

“

Tokoh-tokoh utama di kampung seperti pejabat kampung, guru, pendeta, semua terlibat aktif.

Mereka memiliki kesempatan untuk berkontribusi.

Bonefasius Jakfa

Wakil Ketua tim Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat



Pernyataan itu diungkapkan Bonefasius Jakfa dalam pertemuan membahas tindak lanjut kegiatan sosialisasi Program BANGGA Papua di Agats, 22 Mei 2018. Di tahun 2018 ini, Sekber Asmat telah menganggarkan biaya untuk kegiatan sosialisasi Program BANGGA Papua ke 18 distrik. Hingga April 2018 telah terealisasi ke 10 distrik. Sosialisasi diawali dengan sensus penduduk pembangunan ekonomi di akhir tahun 2017.

“Sosialisasi sudah kami lakukan di 224 kampung. Sekarang tinggal me-*refresh* pengetahuan ke distrik-distrik,” kata Blasius B. Wasa, salah satu anggota Sekber Asmat.

Sebagai tindak lanjut sosialisasi awal itu, tim Sekber Asmat turun ke lapangan melakukan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan antara



Foto : Syaifullah/ Yayasan BaKTI

lain dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kampung.

Pembekalan tentang program BANGGA Papua ini digelar oleh tim Sekber Asmat kepada semua kepala dinas dan kepala bidang yang akan turun ke lapangan. Diharapkan mereka ini bisa menjadi perpanjangan tangan untuk melakukan sosialisasi selepas acara inti mereka di tingkat kampung atau distrik.

“Semua OPD memang diminta untuk bekerjasama mendukung program ini,” pungkas Blasius Wasa.

Kerja sama lintas OPD juga tercermin dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim Sekber Asmat. Dalam sosialisasi ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga ikut turun. Tujuannya adalah sekaligus mendaftar dan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada warga yang belum punya NIK. NIK

adalah salah satu persyaratan bagi calon penerima manfaat BANGGA Papua.

Sampai bulan Mei 2018, tercatat sudah 8.655 calon penerima manfaat yang didata tim Sekber Asmat. Pendataan dan verifikasi akan terus dilakukan sampai batas waktu 30 Agustus 2018.

Kepala Distrik, Ujung Tombak Sosialisasi

“Kepala Distrik adalah ujung tombak kami dalam sosialisasi,” kata Reza Baadilah, Kabag Humas Pemda Kabupaten Asmat yang sekaligus anggota tim komunikasi Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat.

Pernyataan Reza Baadilah itu muncul menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi Kabupaten Asmat dalam melakukan sosialisasi program BANGGA Papua. Asmat memang jadi salah satu lokasi *pilot project* BANGGA Papua bersama dua kabupaten lain, Lanny Jaya dan



Paniai. Dengan total 224 kampung di 23 distrik, sosialisasi memang jadi kendala tersendiri. Apalagi Asmat bukan daerah yang gampang dijangkau. Beberapa kampung berada sangat jauh di pedalaman, butuh perahu dan kadang jalan kaki berjam-jam untuk menjangkaunya.

Para kepala distrik di Asmat akan mendapatkan pengetahuan tentang BANGGA Papua sehingga kelak mereka juga dapat melakukan sosialisasi kepada warganya. “Pembekalan kepada kepala distrik itu akan dilakukan ketika para kepala distrik berkumpul di ibukota kabupaten”, kata Yustus Kakom, Asisten I Setda Asmat. Yustus Kakom juga sekaligus menjadi Ketua Tim Komunikasi Sekber Asmat.

Pembekalan kepada kepala distrik juga tidak dilakukan hanya sekali. Dalam beberapa kesempatan, kepala distrik akan berkumpul di ibukota Agats untuk menyerahkan laporan. Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat untuk menyegarkan ingatan dan pengetahuan mereka tentang program ini. Memanfaatkan kesempatan

ini tentunya lebih efektif ketimbang melakukan satu pertemuan dengan mengumpulkan kepala distrik terus menerus. Mengundang dan mengumpulkan kepala distrik tentu butuh biaya. Belum lagi tidak semua kepala distrik bisa berkumpul di satu waktu yang sama. Maka, menyelipkan bimbingan teknis tentang BANGGA Papua ketika kepala distrik ada di Agats tentu jauh lebih efektif dari segi waktu dan dana.

“Sosialisasi yang kita lakukan dengan menumpang pada jadwal OPD dan kepala distrik itu sama sekali tidak pakai dana. Mereka kan sudah punya anggaran sendiri. Kita tinggal selipkan saja materi tentang BANGGA Papua. Paling kita hanya keluar dana untuk penggandaan materi sosialisasi saja,” kata Bonefasius Jakfa, Wakil Ketua Sekber Asmat.

Sosialisasi lewat kepala distrik ini, menurut Bonefasius Jakfa maupun Yustus Kakom, dinilai lebih efektif daripada Sekber yang harus turun langsung. Mereka berdua juga menggaransi komitmen dari kepala distrik untuk ikut melancarkan program BANGGA Papua.



Foto-foto : Syaifullah/ Yayasan BaKTI

“Ini kan bagian dari tugas mereka, yaitu mendukung program pemerintah kabupaten,” kata Yustus Kakom.

Kepala distrik memang diharapkan akan turun ke kampung-kampung untuk melakukan sosialisasi BANGGA Papua. Semua dana yang dibutuhkan akan dimasukkan ke dalam anggaran kerja distrik tersebut, mengingat mereka memang dibekali dengan anggaran operasional.

Kerjasama dengan Media

Selain bekerjasama dengan OPD dan kepala distrik, tim komunikasi Sekber Asmat juga memanfaatkan kedekatan mereka dengan media. Menurut Reza Baadilah, pemerintah Kabupaten Asmat memang punya media internal yang diberi nama Asmat Atakam.

Media ini terbit dua bulan sekali. Isinya tentang kegiatan dan program Pemerintah Daerah Asmat. Di dalam majalah itu juga diselipkan berita dan materi sosialisasi tentang BANGGA Papua.

“Kami cetak 400 eksemplar dan dibagikan ke kampung-kampung,” kata Reza Baadilah.

Bukan hanya media lokal, tim Humas Kabupaten Asmat juga bekerjasama dengan beberapa media lokal Papua seperti Cendrawasih Post dan Harian Suara Papua. Kedua media itu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Asmat untuk menaikkan berita tentang kegiatan Pemda Asmat, termasuk tentang BANGGA Papua. Selama ini, liputan tentang BANGGA Papua di media tersebut masih bersifat *hard news* atau liputan tentang kegiatan. Belum berupa liputan yang membahas lebih dalam tentang BANGGA Papua. Meski begitu, kerjasama dengan media tersebut menurut Reza Baadilah sudah cukup untuk membantu membangun kesadaran warga tentang adanya program BANGGA Papua.

Call Center

Menilik langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh Sekber Asmat, bisa dirasakan adanya semangat dan kreativitas dalam memanfaatkan semua aset yang dimiliki. Tim Sekber Asmat mampu menggandeng OPD, kepala distrik dan media sebagai rekan mereka untuk sama-sama membantu sosialisasi BANGGA Papua. Langkah ini tentu saja terhitung sangat efektif daripada melakukan sosialisasi sendirian ke 224 kampung dan 23 distrik.

Selain itu, tim Sekber Asmat juga punya terobosan baru dengan menciptakan semacam *call center*. Anggota tim Sekber memberikan nomor telepon mereka kepada rekanan yang melakukan sosialisasi di lapangan. Ketika ada masalah atau pertanyaan dari warga, maka mereka akan menelepon langsung tim Sekber untuk mencari solusi.

“Sejak bulan lalu kita sudah ditelepon terus ini. Ditanya, ‘kapan pencairan?’” kata Blasius. Dia kemudian melanjutkan, “Ya, kita kasih pengertian saja kalau pencairan memang sedang diproses dan dana mereka tidak akan hilang.”

Apa yang dilakukan oleh tim Sekber Asmat memang bisa dikategorikan sebagai praktik baik. Sekber Asmat memanfaatkan jejaring untuk sama-sama membantu kelancaran program. Semoga saja praktik ini juga bisa direplikasi oleh kabupaten lain, dan bukan hanya kabupaten yang menjadi sasaran program BANGGA Papua. Tetapi untuk program apa saja. Karena kreativitas dan kemauan untuk bekerjasama bisa jadi kunci berhasilnya sebuah program.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA PAPUA, hubungi info@bakti.or.id



Foto : Mugniar Marakarma

Mengapa Perlu Analisis Kebijakan Berbasis Bukti

(Bagian 1)

Oleh **MUGNIAR MARAKARMA**

Muhammad Iqbal Suhaeb – Kepala Balitbangda (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan membuka Seminar Pertemuan Berbagi Pengetahuan tentang Pentingnya Kebijakan Publik Berbasis Bukti yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Menurutnya istilah 'berbasis bukti' atau *'evidence based'* telah sejak lama dikenali di kampus-kampus sebagai salah satu pendekatan pembangunan. Semestinya kebijakan juga berbasis bukti. Baru beberapa tahun terakhir istilah ini aktif disosialisasikan oleh beberapa lembaga, di antaranya oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan Knowledge Sector Initiative.

Pada seminar yang berlangsung di Hotel Melia pada 5 Juli silam, Iqbal Suhaeb mengatakan bahwa banyak penghargaan dalam bidang inovasi kebijakan bahkan dikompetisikan hingga tingkat

nasional dan internasional yang sebenarnya hanya *launching*. Sangat disayangkan karena seharusnya dilihat dulu implementasi kebijakan tersebut minimal selama 3 tahun.

Contoh lebih spesifik disebutkan mengenai kabupaten Takalar yang dahulu pernah menjadi tempat belajar Sistem Perizinan Satu Atap dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Ketika bupati saat itu diganti, tidak ada lagi inovasi-inovasi baru dan tidak pernah lagi disebut-sebut kabupaten tersebut.

"Inovasi memang kadang-kadang identik dengan kepala daerah namun alangkah baiknya jika inovasi itu dimasukkan sebagai 'proses' sehingga siapa pun kepala daerahnya, inovasi itu bisa tetap jalan. Karena ketika berbicara tentang KEBIJAKAN PUBLIK, ujung-ujungnya tentu untuk masyarakat. Bicara kebijakan, *customer* kita masyarakat – bukan media," tukas Pak Iqbal. Di zaman sekarang kadang-kadang pengambil kebijakan lebih fokus ke media. Lebih suka jika

tampilan di media bagus meskipun masyarakat tidak bagus padahal sebaiknya melihat juga sejauh mana kontinuitas keberlangsungan dari program tersebut.

Namun kadang-kadang pula ada daerah yang inovasinya berlangsung sangat cepat namun bermasalah dengan hukum. Ini perlu menjadi perhatian agar cepatnya inovasi kebijakan juga sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Latar belakang penyelenggaraan seminar ini adalah karena secara umum, praktik pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*) belum konsisten di Indonesia. Sering kali, keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sedang populer dalam jangka pendek bukan apa yang sedang berjalan dalam jangka menengah dan panjang. Atau kebijakan publik dibuat hanya berdasarkan intuisi, opini, dan kepentingan sektoral. Di sisi lain, banyak penelitian yang dilakukan baik oleh para akademisi, lembaga non-pemerintah dan Balitbang kerap kali tidak relevan dengan kebutuhan bukti oleh pengambil kebijakan. Akibatnya banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak menyebabkan dampak optimal seperti yang diharapkan.

Kebijakan publik yang dibuat juga sering tidak memberi telaah yang baik mengenai perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dan/atau kelompok masyarakat yang marjinal seperti anak-anak atau orang dewasa yang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Dampak kebijakan publik yang tidak sensitif kesetaraan gender dan inklusi sosial (*Gender Equality and Social Inclusion/GESI*), walaupun di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, antara lain adalah adanya kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat bahkan antar wilayah.

Pembicara pertama di seminar ini adalah Iskhak Fatonie dari Knowledge Sector Initiative (KSI). KSI adalah program kerja sama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya penguatan kebijakan publik yang berbasis bukti di Indonesia. Dimulai dari Fase 1 (2013-2017) dan saat ini baru memulai Fase 2 (2018-2022), bersama seluruh mitra kerja khususnya BAPPENAS, Kemenristek Dikti, KemenPANRB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Riset Kebijakan (*Public Research Institutes – PRIs*), perguruan-perguruan tinggi di Indonesia dan di Australia, KSI bekerja untuk memperkuat kualitas bukti penelitian dari penyedia; meningkatkan kebutuhan dan permintaan bukti penelitian untuk

pembuatan kebijakan; memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi pihak penyedia dan pengguna bukti penelitian; dan mendukung upaya perubahan sistem dan regulasi untuk perbaikan ekosistem pengembangan kebijakan berbasis bukti.

Pak Iskhak membawakan presentasi berjudul Mengapa, Apa, dan Bagaimana Kebijakan Berbasis Bukti dan Relevansinya di Sulawesi Selatan. Di dalam presentasinya, Pak Iskhak menguatkan alasan mengapa perlu kebijakan berbasis bukti (penelitian), yaitu karena banyak terjadi:

- Dari sisi pengambil kebijakan: intuisi, kepentingan jangka pendek, tidak sensitif terhadap gender dan kelompok berkebutuhan khusus, dan tidak optimal.
- Dari sisi kualitas dan relevansi penelitian untuk kebijakan: kurang relevan – tidak menjawab kebutuhan, terlalu akademis, dan waktunya tidak pas.

Hambatan lainnya adalah lemahnya sektor pengetahuan:

1. Lemahnya kapasitas untuk menggunakan bukti dan pengetahuan.
2. Rendahnya anggaran dan kualitas penyerapan.
3. Ketersediaan dan akses untuk data yang terbatas.
4. Ketidakjelasan peraturan tentang kajian dan penelitian.
5. Lemahnya interaksi antara penyedia dan pengguna pengetahuan.
6. Rendahnya kualitas kajian dan analisis.

Dalam pikiran sederhana saya, kepada anak saja, seorang ibu dan seorang ayah seharusnya memberikan aturan atau kebijakan berbasis bukti. Misalnya saja, disesuaikan dengan tindakan sebelumnya yang dilakukan, disesuaikan dengan umur, dengan jenis kelamin, dan dengan konteks yang berlaku. Tentunya tidak boleh dong saya sebagai ibu menerapkan kebijakan yang saya contek dari rumah tangga orang lain untuk diterapkan di keluarga saya – kepada anak saya dan kepada seluruh anggota keluarga? Atau saya menerapkan kebijakan orang tua saya atau orang tua suami kepada kami dulu untuk diterapkan kepada anak kami di masa sekarang secara mentah-mentah? Apa lagi itu untuk diterapkan di level kota, provinsi, dan negara, kan? Benar, kan?

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi via email mugniagmarakarma@gmail.com



Kesetaraan Gender dalam SDGs

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Tahun 2015 merupakan ujung berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals, MDGs*) yang dimulai pada awal tahun 2000.

Selama lima belas tahun, pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan dan pembelajaran. Dari segi capaian tujuan, *The Millennium Development Goals Report 2015*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat beberapa keberhasilan dalam hal pengurangan kemiskinan, perbaikan akses pendidikan dasar universal, penurunan kematian bayi, dan beberapa tujuan lain;

seraya mengakui beberapa keterbatasan dalam perbaikan ketimpangan gender, ketimpangan kaya-miskin; dan ketimpangan desa-kota, serta keterbatasan dalam perbaikan iklim, konflik, dan lain-lain.

Dengan berakhirnya MDGs, maka masyarakat dunia membutuhkan panduan baru dalam pembangunan. Pencapaian dan kekurangan dalam pelaksanaan MDGs menjadi pembelajaran berharga bagi PBB dan masyarakat dunia untuk membuat dokumen yang lebih lengkap dan menjadi panduan bersama.

Karena itu, sejak akhir September 2015, setelah bekerja lebih tiga tahun, 193 negara anggota PBB mencanangkan kesepakatan baru yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*). SDGs sebagai pengganti MDGs mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2016 dan



Foto: Frans Gosali/ Yayasan BaKTI

Kegiatan konsultasi publik penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Maros membahas 17 tujuan pembangunan SDGs.

mempunyai 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan Target SDGs dipilah ke dalam 5 kategori besar, yaitu rakyat (*people*), planet (*planet*), kemakmuran (*prosperity*), perdamaian (*peace*), dan kemitraan (*partnership*).

Perempuan dan Kesetaraan Gender

SDGs berbeda dengan MDGs dalam konteks dan teks yang diuraikan dalam beberapa segi antara lain jumlah tujuan dan target, proses perumusan, asumsi pendanaan, serta skala dan ambisi perubahan yang dicanangkan. Dari segi

Tujuan, ada empat hal yang layak dicatat, yaitu kesetaraan gender, penurunan ketimpangan, perubahan pola konsumsi dan produksi dan berbagai tujuan ekologi lainnya, serta tata pemerintahan yang inklusif dan anti korupsi. Keempat hal itu, yang tidak ada dalam MDGs, mencanangkan skala perubahan lebih luas, sistemik, dan struktural (*wholesale change*), serta melakukan pergeseran radikal dalam pendekatan pembangunan (Bahagijo, 2016).

Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dan mempunyai beberapa target dalam SDGs.

17 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



Perhatian terhadap kesetaraan gender di SDGs juga didasari keterbatasan dalam perbaikan ketimpangan gender selama lima belas tahun era MDGs. Kesenjaraan gender merupakan Tujuan Nomor 5 SDGs dengan 9 target.

Target-target yang hendak dicapai pada Tujuan 5 juga sangat komprehensif, di antaranya mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan (target 5.1); mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (*trafficking*) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya (target 5.2); menghapuskan bentuk-bentuk praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini, paksa, dan sunat pada perempuan (target 5.3); memastikan semua perempuan berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik (target 5.5); memastikan akses universal terhadap

kesehatan seksual dan reproduksi (target 5.6); dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik (target 5.4).

Selain kesetaraan gender, aspirasi mengenai kesetaraan juga ditemukan pada tujuan pertama sampai ketujuh dan pada tujuan kesepuluh SDGs. Target-target yang hendak dicapai pada tujuan-tujuan tersebut selalu menyebut frasa 'bagi semua', juga menekankan pada kelompok perempuan, anak perempuan, anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, manula, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Program MAMPU dan SDGs

Tujuan akhir Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesenjaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) fase 2 yaitu meningkatkan akses perempuan miskin kepada layanan penting dan program-program pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program MAMPU

dilaksanakan sejak tahun 2013, sehingga mempunyai sejumlah pembelajaran dan inovasi yang dapat diintegrasikan ke dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.

Beberapa dimensi penting dari pengintegrasian Program MAMPU untuk implementasi dan pencapaian SDGs antara lain: (a) bahwa prinsip *no one left behind* atau “tak seorangpun ditinggalkan”, prinsip universalitas dan prinsip kesetaraan, termasuk kesetaraan gender, sejalan dengan semangat program MAMPU yang jangkauannya ditujukan kepada kelompok-kelompok terpinggirkan terutama perempuan; (b) keterikatan Indonesia dengan komitmen internasional sampai tahun 2030 menjamin keberlanjutan upaya pencapaian SDGs, kendati terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan di tingkat daerah dan nasional; (c) Penerbitan Perpres nomor 59 tahun 2017 dengan pengarahannya yang dipimpin langsung oleh presiden menunjukkan komitmen Indonesia terhadap SDGs; (d) rekomendasi gerakan masyarakat sipil dalam pertemuan nasional tentang pentingnya mengimplementasikan perspektif gender dalam SDGs; (e) pentingnya mengintegrasikan pengalaman dan perspektif Program MAMPU tentang kepemimpinan perempuan untuk penghapusan kemiskinan yang diharapkan diadopsi pemerintah dalam rangka pencapaian SDGs; (f) Saat ini pemerintah pusat dan daerah sedang mempersiapkan struktur kelembagaan SDGs, penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2015-2019; (g) Menjelang pemilihan presiden pemerintah menyiapkan RPJMN 2020-2024 dan pengalaman program MAMPU akan diusulkan menjadi masukan dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024 (*Terms of Reference* Konsultasi Publik RAD SDGs MAMPU).

Prinsip *No One Left Behind* memberikan pesan utama agar implementasi dan pencapaian SDGs selalu memastikan kelompok rentan, minoritas, dan marginal tidak satupun diabaikan. Program MAMPU juga memiliki arah yang sama, menjangkau kelompok-kelompok miskin, minoritas, dan marginal terutama perempuan.

Rencana Aksi Daerah SDGs

Program MAMPU menjadi wadah bagi organisasi perempuan dan organisasi prodemokrasi yang berkomitmen terhadap keadilan gender telah berjalan 5 tahun. Pengalaman sepanjang 5 tahun melakukan penguatan kepemimpinan perempuan untuk mendorong tercapainya peningkatan akses

perempuan terhadap pelayanan publik dan program pemerintah saat ini menjangkau 900 desa, 140 kabupaten/kota dan 27 provinsi.

Dengan durasi waktu relatif lama dan jangkauan cukup besar ini saatnya program MAMPU mengkontribusikan pengalaman dan pengetahuannya untuk implementasi dan pencapaian SDGs di Indonesia. Jika diintegrasikan dengan SDGs, MAMPU memiliki keterikatan dengan 6 tujuan, yaitu tujuan 1 (tanpa kemiskinan); tujuan 2 (tanpa kemiskinan); tujuan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), tujuan 5 (kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan), tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi); tujuan 10 (berkurangnya ketimpangan); dan tujuan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra nasional Program MAMPU memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Maros, Kota Parepare, dan Kendari. Dukungan Program MAMPU Yayasan BaKTI untuk tiga daerah tersebut merupakan *pilot project* yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Sebagai sebuah komitmen dan tujuan internasional, SDGs diharapkan menjadi panduan bersama untuk meningkatkan taraf hidup kelompok rentan, minoritas, dan marginal. Perempuan dan perempuan miskin adalah kelompok yang rentan. Karena itu, tujuan kelima SDGs merupakan salah satu tujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan. Karena pangkal dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan adalah diskriminasi.

RAD kabupaten/kota mempunyai posisi yang sangat strategis, karena selain menjadi panduan bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs secara nasional, juga menjadi salah satu peta bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan responsif gender.

Pengalaman Yayasan BaKTI dan mitranya di daerah dalam mengembangkan Program MAMPU, dapat berkontribusi pada penyusunan RAD di daerah. Pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam penyusunan RAD adalah salah satu yang sangat riil dalam upaya mendorong dan memberi kesempatan kepada perempuan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MAMPU BaKTI, hubungi info@bakti.or.id

Hubungkan Tanah Papua, Targetkan Indonesia Merdeka Internet 2019

Oleh **NOOR IZA**





Agenda Pemerintah untuk memastikan pemerataan pembangunan bidang telekomunikasi terwujud bertahap. Melalui penyediaan akses telekomunikasi USO dan internet rakyat, Badan Aksesibilitas Teknologi Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun Base Transceiver Station (BTS) di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dan akses internet untuk sekolah serta Puskesmas.

Selasa (17/07/2018) kemarin, Menteri Kominfo Rudiantara mengunjungi dua kabupaten terdalam di tengah Papua yaitu Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Membramo Raya untuk melihat secara langsung layanan telekomunikasi USO dan memastikan rencana Palapa Ring Timur berjalan dengan baik.

"Sesuai dengan agenda Pemerintahan Pak Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Kominfo dan BAKTI menyediakan akses untuk seluruh masyarakat Indonesia. Membangun dengan Indonesia Sentris mulai dari pinggiran agar setara dengan di Jawa, Sumatera dan Kalimantan," kata Menteri Kominfo Rudiantara dalam Kunjungan Kerja untuk melihat pembangunan Palapa Ring Timur dan BTS 3T di SMKN 1 Mulia Kab. Puncak Jaya, Papua.

Indonesia Sentris menurut Menteri Rudiantara merupakan cara yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. "Pinggiran bukan terpinggirkan, tapi bagian dari NKRI yang harus dijaga seutuhnya. Puncak Jaya ini tengahan (karena berada di tengah Papua) dan kita selalu bekerja untuk adik-adik kita dan masa depan yang lebih baik," jelasnya.

Bahkan Menteri Kominfo menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan terhubung dengan jaringan *backbone* internet cepat pada Tahun 2019. "Ini kebijakan keberpihakan pemerintah untuk memastikan seluruh rakyat bisa akses internet cepat," tandasnya.

Akses telekomunikasi dalam pandangan Menteri Kominfo merupakan hak warga negara Indonesia. "Bulan depan Indonesia sudah merdeka 73 tahun, kita sudah merdeka dari penjajah tapi belum merdeka dari internet," ungkapnya.

Menghubungkan Tanah Papua dengan Telekomunikasi dan Internet

Tanah Papua, menurut Menteri Kominfo merupakan berkah besar bagi Bangsa Indonesia. "Tanah Papua beri berkah bagi kita, tadi dalam perjalanan ke sini diberitahu Pak Sekda Provinsi itu di gunung situ emas paling besar. Dulu banyak orang tinggal ambil saja, hanya saja untuk menerimanya saya harus terbang," tuturnya mengagumi keindahan dan potensi Papua.

Menteri Rudiantara mengakui adanya tantangan dalam membangun infrastruktur di kawasan Papua. "Demikian halnya dalam hal membangun telekomunikasi. Papua tak seperti Jawa yang kondisi geografisnya lebih mudah dibangun," katanya.

Mengenai pembangunan akses telekomunikasi, Menteri Kominfo mengibaratkan seperti akses perhubungan. "Seperti Puncak Jaya yang semua tak bisa dijangkau dengan jalan darat, harus udara. Di telekomunikasi kalau tidak bisa pakai kabel ya pakai satelit," jelasnya.

Mengenai kapasitas akses jaringan, Menteri Rudiantara juga mengibaratkan seperti pesawat terbang. "Soal kapasitas ya sama seperti pesawat terbang akan bergantung jenis pesawatnya. Analoginya hampir sama dengan telekomunikasi," urainya.

Dalam mewujudkan konektivitas sesuai dengan prioritas Pemerintah, Menteri Kominfo menunjukkan tekadnya. "Kami tidak akan menyerah. Semua kabupaten di Papua dan Papua ada 41 kabupaten yang akan dibangun jaringan



Foto : Dok. Kominfo

Menteri Kominfo Rudiantara bersama warga Kampung Sikari Distrik Batavia Kab. Mamberamo Raya, Papua. Sekitar 300 meter di belakang rumah terdapat BTS USO yang bisa digunakan warga untuk berkomunikasi melalui jaringan seluler. Menurut Kepala Kampung Sikari Obed Sibetai, Menteri Rudiantara adalah menteri pertama yang datang ke kampung berjarak satu jam perjalanan udara dari Bandara Sentani, Papua.

tulang punggung internet cepat. Ada 31 (daerah kabupaten) yang baru untuk dibangun akses yg baru internet kecepatan tinggi. Ini kebijakan keberpihakan dari pemerintah yang Indonesia Sentris," jelasnya.

Secara khusus Menteri Kominfo meminta bantuan Bupati dan seluruh jajarannya untuk memastikan akses internet bisa terwujud. "Kita canangkan pada 2020 mudah-mudahan tidak ada desa yang tidak ada BTS. Pada tahun 2019 di Puncak Jaya desa yang belum dipasang, mudah-mudahan bisa dipasang (internet). Kami mohon bantuan dari Pak Bupati karena masalah di Papua ini soal tanah. Nomor satu soal perizinan, kedua tanah kalau tidak ada tanah pasang antena dimana?," pintanya.

Mengenai akses internet yang sudah digunakan untuk kebutuhan sekolah, Menteri Kominfo memastikan tahun ini akan ada penambahan titik akses internet. "Sampai akhir tahun ini akan ada penambahan kapasitas. Tadi Bapak Bupati minta ada tambahan dua titik, kami akan kasih empat titik," katanya.

Sebelumnya, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda menghargai terobosan baru pemerintah pusat untuk membangun telekomunikasi di kawasan terdepan, terpencil dan tertinggal. "Terobosan baru Pemerintah Jokowi-JK untuk membangun

telekomunikasi di daerah 3T sangat dirasakan manfaatnya. Terima kasih atas akses internet rakyat di sekolah, Puskesmas, serta lokasi publik," katanya.

Bahkan Bupati Juniwonda meminta agar tahun depan seluruh sekolah bisa mendapatkan akses internet untuk kebutuhan ujian nasional dan penerimaan peserta didik baru. "Kami berharap tahun depan seluruh Puncak Jaya dapat akses internet sehingga (bisa) penerapan sistem PPDB, dan dengan adanya akses internet bisa kiris kesenjangan akses di pedesaan," pintanya.

Menteri Sinyal

Ketika berkunjung ke Mamberamo Raya, Bupati Dorinus Dasinapa tampak senang karena sudah mendapatkan akses telekomunikasi USO dan pembangunan Palapa Ring. Menurutnya saat ini Pemerintah Pusat sudah dapat menunjukkan pembangunan berlangsung sampai ke desa dan pelosok. "Konsepnya banyak yang luar biasa. Implementasinya sudah sampai ke daerah. Saya berdoa kepada Tuhan untuk selalu dikasih pertolongan," katanya.

Menurut Bupati Dasinapa, kabupaten yang dipimpinnya memiliki Sungai Mamberamo Raya. Salah satu sungai terbesar di Papua serta hutan lebat masih perawan dengan potensi wisata dan

kayu. "Belum digarap maksimal untuk kebutuhan rakyat. Mohon kiranya sentuhan yang diberikan kepada kami di bidang telekomunikasi telah diikuti bidang lain. Rakyat membutuhkan listrik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bahan pokok yang terjadwal bagi masyarakat," paparnya. Dalam bidang telekomunikasi yang menjadi sasaran kunjungan Menteri Kominfo, menurut Bupati Mamberamo Raya saat ini sudah dibangun sejumlah BTS oleh BAKTI di 9 titik dan NOC untuk Palapa Ring. "BTS yang dibangun BAKTI Kominfo sudah luar biasa jaringannya, masyarakat berterima kasih. Bisa telepon daerah yang lain," ungkapnya.

Kemudian Menteri Kominfo segera keluar ke anjungan *guest house* sambil membawa *microphone*. "Bapak dan Ibu sekalian termasuk anak-anak saya datang ke sini untuk memastikan pembangunan menara telekomunikasi berlangsung baik. Agar kehidupan masyarakat di sini lebih baik," katanya.

Usai sambutan, seorang warga bertanya kapan lampu nyala lagi di Mamberamo Raya? Kemudian Menteri Rudiantara menjawab bahwa kedatangannya untuk membangun dan memastikan akses sinyal telekomunikasi. "Saya bukan menteri lampu tapi Menteri Sinyal. Saya datang ke sini bawa sinyal lewat BTS itu yang bisa bapak dan ibu gunakan untuk telepon," katanya.

Kontan Freddy, warga Mamberamo minta tolong agar disampaikan ke Menteri yang urusi lampu agar segera ada listrik lagi. "Tolong sampaikan Pak Menteri, kami butuh listrik. Kalau sinyal kami juga ucapkan terima kasih sudah dibantu," jelasnya.

Merdeka Internet

Target untuk merdeka internet sudah mulai dengan membangun akses telekomunikasi. Di kawasan perbatasan BAKTI melalui Program BAKTI Sinyal menyediakan perangkat BTS dengan panel surya agar memudahkan komunikasi antarwarga.

"Sementara dalam penyediaan internet, melalui Program BAKTI Aksi atau Akses Internet kami menyediakan dukungan internet untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan layanan publik," jelas Dirut BAKTI Anang Latif yang ikut dalam Kunjungan Kerja Menteri Kominfo di Puncak Jaya dan Mamberamo Raya.

Menurut Direktur Anang Latif, sesuai dengan target Menteri Kominfo, penyediaan akses internet cepat juga dilakukan melalui Palapa Ring dan *High Throughput Satellite*. "Melalui BAKTI Paring (Palapa Ring) dan BAKTI Satria (Satelit

Republik Indonesia) dibangun jaringan tulang punggung internet kecepatan tinggi," tambahnya. Ketersediaan internet cepat menurut Menteri Rudiantara diperuntukan generasi masa depan Indonesia. "Saya selalu membuat tahun 2030 sebagai acuan untuk menunjukkan bahwa saat itu Indonesia mengalami bonus demografi dan anak-anak yang ada di depan kita ini mengalami masa produktif," tuturnya.

Oleh karena itu, perlu disiapkan akses internet agar mereka bisa menjadi lebih maju dan lebih baik. "Fokus pemerintah menyiapkan sumberdaya manusia, diprediksikan ekonomi Indonesia nanti akan meningkat menjadi dua setengah kali dari Indonesia sekarang. Oleh karena itu seluruh program untuk meningkatkan akses telekomunikasi dan merdeka internet tidak boleh berhenti," tegasnya.

Bahkan Menteri Kominfo menegaskan jika Palapa Ring Timur akan membutuhkan waktu lebih lama maka Kementerian Kominfo melakukan terobosan untuk percepatan.

"Kalau Palapa Ring membutuhkan waktu lebih lama maka Tahun 2022 kita akan sediakan satelit. Jika perlu sebelum satelit ada kami akan cari cara agar bisa sewa untuk memastikan akses internet cepat bisa digunakan masyarakat," tuturnya.

Menteri Rudiantara mengingatkan agar jajaran pemerintah daerah membantu untuk memastikan agar akses internet dapat digunakan dengan baik. "Kecepatannya 10 Mbps, di Puncak Jaya ada 32 sekolah dasar, 7 SMP dan 2 SMA dan 2 SMK. Pak Bupati dan para guru nanti tolong jaga anak-anak untuk pastikan adik-adik belajarnya menggunakan internet. Tolong jaga anak-anak kalau buka ponsel baru nantinya agar tidak lari kemana-mana. Tolong diajari bagaimana menggunakan media sosial dan internet dengan baik," ungkapnya.

Dalam kunjungan kerja itu, Menteri Rudiantara didampingi oleh Direktur Utama BAKTI Anang Latif, Sekdapro Papua Titus Emanuel Adopehan Hery Dosinaen, Kepala Dinas Kominfo Papua Kansiana Salle, Kepala Balmon Jayapura Titus Tangke serta CEO Inforte Solusi Infotek Peter Djatmiko dan GM Infokom Tri Bimo.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo dan dapat dihubungi melalui email: humas@mail.kominfo.go.id. Artikel ini bersumber dari : www.kominfo.go.id/content/detail/13490/siaran-pers-no-138hmkominfo072018-tentang-hubungkan-tanah-papua-targetkan-indonesia-merdeka-internet-2019/0/siaran_pers

Penelitian “Water-Sensitive Cities” Lepas Landas di 12 Lokasi di Makassar

Oleh **INA RAHLINA**

“Sekarang kami membeli air galon bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk mandi dan mencuci,” ujar warga Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkayana dalam sebuah diskusi warga bersama tim *Revitalising Informal Settlements and their Environment (RISE)* Indonesia, Junilalu.

Akses air bersih di permukiman ini memang sulit karena kondisi permukiman yang berada di atas lahan bebatuan. Untuk memperoleh air bersih, warga harus membangun sumur bor dengan kedalaman sekitar 60 hingga 100 meter dan itu butuh dana belasan hingga puluhan juta Rupiah. Hanya beberapa warga bisa mewujudkan hal itu, sebagian lainnya terpaksa 'menumpang' memperoleh air bersih dari tetangga maupun perumahan yang berjarak sekitar 200 meter dari permukiman mereka.

Sejak pertengahan Mei 2018 lalu, warga tak lagi diperbolehkan mengakses air bersih di perumahan tersebut. Membeli air galon isi ulang jadi alternatif. Satu rumah tangga butuh sekitar 4-10 galon air per hari dengan harga 6 ribu rupiah per galon. Di musim hujan, mereka



Foto: Dok. RISE Indonesia



Foto : Dok. RISE Indonesia

Kiri : Warga di Kelurahan Untia menggunakan layanan tanki air PDAM untuk memperoleh air bersih. Untia merupakan salah satu dari 12 daerah penelitian RISE Indonesia di Makassar.

Kanan : Laboran Lab Parastologi Fakultas Kedokteran Unhas dan *Team Assessment* RISE Indonesia melakukan pelatihan Kato Katz untuk diagnosis kualitatif dan semi kuantitatif infeksi cacing usus dari tinja anak berusia di bawah 5 tahun di daerah penelitian RISE.

bisa menggunakan air tadah hujan dan sumur-sumur gali dengan kedalaman 6 - 10 meter yang berfungsi kembali karena terisi air. Namun, masalah genangan dan banjir juga jadi ancaman tersendiri saat hujan turun.

Sulitnya memperoleh air bersih di musim kemarau dan ancaman banjir saat hujan umum dialami beberapa permukiman kumuh lainnya yang merupakan lokasi penelitian *Revitalising Informal Settlements and Their Environments* (RISE). Tantangan-tantangan air ini terungkap dalam sejumlah pertemuan warga di lokasi penelitian RISE di 12 lokasi utama dan satu lokasi percontohan di Makassar.

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pembangunan betonisasi yang membuat limpasan air hujan tak terserap secara alami dan membuat volume air meningkat dan menggenangi permukiman perkotaan.

Solusi air, sanitasi dan kebersihan saat ini tidak selalu berhasil karena mereka mengandalkan pipa-pipa besar yang tidak mampu menjangkau semua orang, terutama permukiman informal. Pertumbuhan jumlah warga yang sangat pesat di permukiman informal, dan ancaman dari perubahan iklim membutuhkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan untuk menjawab semua tantangan ini.

Pendekatan Kota Peka Air

RISE adalah program penelitian interdisipliner mancanegara yang bertujuan untuk mengujicoba pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kehidupan warga di

permukiman kumuh perkotaan dan membersihkan lingkungan.

RISE berjalan selama lima tahun (2017-2022) yang mengujicoba solusi pengelolaan air terpadu yang diharapkan dapat menghasilkan perbaikan kesehatan manusia dan lingkungan di permukiman kumuh di Kota Makassar, Indonesia dan Kota Suva, Fiji.

RISE menggunakan pendekatan berbasis alam dengan konsep *Water Sensitive Cities* (WSC) atau Kota Peka Air untuk memperbaiki permukiman kumuh, yang diharapkan akan membawa banyak manfaat; antara lain meningkatkan kesehatan manusia dan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi lingkungan. Program penelitian ini dilaksanakan di 24 permukiman; 12 permukiman di Makassar, Indonesia dan 12 permukiman di Kota Suva, Fiji.

Program penelitian ini merupakan kemitraan antara Monash University dan Universitas Hasanuddin (UNHAS), yang memperkuat hubungan penelitian antara Australia dan Indonesia serta mendukung kedua negara dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

RISE bertujuan untuk memberikan bukti ilmiah berbasis metode penelitian *Randomised Control Trial* (RCT) atau Uji Acak Terkendali bahwa Pendekatan Kota Peka Air dapat memberikan perbaikan kesehatan dan lingkungan yang berkelanjutan dan hemat biaya.

Program ini akan menguji apakah pendekatan WSC dapat memutus rute kontaminasi *fecal-oral* (terkait dengan limbah manusia yang ditelan

ulang) dengan mengurangi paparan terhadap kontaminan tinja sehingga memperbaiki kesehatan pencernaan manusia, terutama untuk anak-anak di bawah 5 tahun.

Lokasi uji coba ini mewakili berbagai karakteristik permukiman perkotaan di Makassar yang berkembang pesat, seperti daerah yang rentan terhadap banjir karena berdekatan dengan sungai atau daerah pesisir, memiliki masalah keterbatasan air bersih dan sanitasi yang tidak memadai, dan jumlah penduduk sekitar 30-100 rumah.

Dipimpin oleh *Monash Sustainable Development Institute*, RISE mengumpulkan keahlian dari lima fakultas Monash University (*Art, Design and Architecture; Business and Economics; Engineering; Medicine, Nursing and Health Sciences; dan Science*), Monash University Malaysia, *CRC for Water Sensitive Cities*, Stanford University, Emory University, The University of Melbourne, University of Cambridge, Fiji National University, Universitas Hasanuddin, The University of the South Pacific, Live & Learn Fiji, United Nations University, Melbourne Water, South East Water, Oxfam, WaterAid, dan Wellcome Sanger Institute.

RISE berusaha menjawab tantangan air di masa mendatang, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan pertumbuhan urbanisasi. Infrastruktur hijau diharapkan memulihkan daya lahan mengabsorpsi air hujan kembali ke alam dan melestarikan ekosistem di sekitarnya.

Pendekatan peka air mengintegrasikan infrastruktur air yang berkelanjutan secara ekologis dan ekonomis ke dalam bangunan dan lansekap. Infrastruktur air yang terdesentralisasi diterapkan pada skala hunian, permukiman, dan lingkungan untuk memanen air hujan dan limpasan hujan, mendaur ulang air limbah, dan melindungi tempat hunian dari banjir dan pencemaran lingkungan.

Air limbah dikelola secara lokal dengan menggunakan proses pengolahan pasif alami seperti rawa buatan dan resapan alami. Air limpasan hujan dialirkan untuk meminimalisir banjir dan pencemaran lingkungan dengan menggunakan saluran berumput, rawa buatan dan kebun resapan alami.

Libatkan FKM dan PWK UNHAS

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UNHAS memimpin komponen penilaian kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan RISE di 12 permukiman kumuh di Makassar, termasuk persiapan dan pengoperasian laboratorium

penelitian. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Teknik UNHAS mendukung implementasi pendekatan peka terhadap air, termasuk desain bersama masyarakat.

Setelah memperoleh Surat Persetujuan Komisi Etik Penelitian Kedokteran, Fakultas Kedokteran UNHAS, bulan Mei lalu, Program RISE saat ini dalam tahap penandatanganan persetujuan warga dan anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Persetujuan warga ini merupakan tonggak utama program RISE yang akan disusul dengan kegiatan *baseline survey*, pengambilan sampel kesehatan manusia dan lingkungan, serta randomisasi lokasi RISE.

Sebagai persiapan, *Assessment Team* RISE mempersiapkan sejumlah standar operasional prosedur (SOP) untuk kegiatan laboratorium, termasuk pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Selain itu juga telah dilaksanakan sejumlah pelatihan, termasuk untuk pengambilan sampel kesehatan manusia dan lingkungan di lapangan dan analisisnya di laboratorium; dan pelatihan untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis cacing (pemeriksaan Kato Katz) di Laboratorium Parasitologi, Fakultas Kedokteran.

RISE *Assesment Team Leader*, Rufika Shari Abidin, PhD menuturkan, selain persiapan SOP dan pelatihan, saat ini timnya bersama pihak FKM sementara menata laboratorium yang akan digunakan untuk memeriksa sampel kesehatan manusia dan lingkungan. Sejumlah peralatan lab akan diadakan oleh Monash dan dihibahkan kepada FKM.

Instalasi dan pelatihan penggunaan alat telah dilakukan untuk beberapa peralatan yang telah diterima, seperti *freezer -80 °C*, *centrifuge*, *stomacher*, dan mikroskop. Peralatan lainnya yang akan tiba dalam waktu dekat termasuk deionizing water unit, mikroskop mikrobiologi, inkubator, *autoclave*, dan peralatan untuk memeriksa mikrobiologi dalam air.

RISE Indonesia *Coordinator*, Jane Wardani, berterima kasih kepada seluruh tim UNHAS yang telah terlibat dan berperan memicu program 5 tahun ini di Makassar. Penelitian ini nantinya diharapkan bisa jadi rujukan untuk permukiman serupa di Indonesia dan negara lainnya yang memiliki tantangan serupa.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program RISE, Anda dapat menghubungi penulis melalui inarahlina.rise@gmail.com



Kegiatan di BaKTI

16 Juli 2018

Kunjungan Mahasiswa Australia ke Program MAMPU

Sebanyak 19 mahasiswa dan 2 dosen pembimbing dari the University of Sydney, mengadakan kunjungan belajar di Sulawesi Selatan sejak 15 Juli hingga 20 Juli 2018. Sebelum kunjungan lapangan, mahasiswa tersebut mengikuti *briefing* singkat bertempat di Kantor BaKTI Makassar.

Di Sulawesi Selatan, rombongan ini berkunjung ke wilayah Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Kunjungan mahasiswa dari The University of Sydney ini untuk ketiga kalinya. Selain BaKTI, mitra yang mendapat kunjungan adalah YKPM (Yayasan Kajian dan Pengembangan Masyarakat) dan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia).

Dua wilayah Program MAMPU-BaKTI yang dikunjungi adalah Kabupaten Maros dan Kota Parepare. Mahasiswa berdiskusi dengan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Konstituen, anggota DPRD Kabupaten



Maros, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maros.

Para mahasiswa tersebut mempelajari pembuatan sebuah kebijakan yang melibatkan masyarakat hingga kebijakan tersebut diimplementasikan dan berdampak pada masyarakat. Mahasiswa berdiskusi dengan anggota DPRD dan DP3A mengenai proses perumusan kebijakan di DPRD hingga penganggaran di eksekutif. Mereka juga berdiskusi dengan anggota DPRD Maros dan DPRD Parepare mengenai Reses Partisipatif, sebuah metode reses yang dikembangkan Yayasan BaKTI dan mitranya, untuk menjadikan reses lebih efektif. Hasil kunjungan mahasiswa di Maros, Parepare dan Pangkep dipresentasikan pada 20 Juli 2018 di Kantor BaKTI Makassar.

19 Juli 2018

Kelas sharing mendongeng

Seni mendongeng mulai ditinggalkan dan digantikan dengan media elektronik. Tak banyak lagi orang tua yang membacakan dongeng untuk anak-anaknya. Padahal ada banyak manfaat yang didapatkan dari mendongeng. Selain mempererat hubungan antara orang tua dan anak, mendongeng juga dapat meningkatkan kemampuan otak dan perkembangan psikologis anak.

Untuk itulah Perpustakaan BaKTI mengadakan *event* kelas *sharing* untuk belajar mendongeng bersama salah satu pendongeng Indonesia, Kang Bugi Sumirat. Dengan gayanya yang santai, Kang Bugi yang

menyebut dirinya seorang *storyteller* berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam mendongeng. Kata kang Bugi, seorang *storyteller* tidak hanya berbicara legenda, namun bisa berkisah tentang kehidupan sehari-hari maupun isu-isu terkini, misalnya isu lingkungan. Untuk menghidupkan cerita ada banyak cara yang bisa dilakukan seperti menggunakan alat peraga boneka, alat musik maupun buku. Selain alat peraga, *mind mapping* dapat membantu pendongeng lebih mudah dalam menemukan ide dan mengembangkannya menjadi satu cerita yang menarik. Sebanyak 28 peserta hadir dari berbagai latar belakang. Kelas ini diakhiri dengan pesan dari Kang Bugi bahwa tidak harus menjadi pendongeng profesional begitu keluar dari kelas ini, setidaknya para peserta bisa mendongeng untuk anak mereka sendiri.



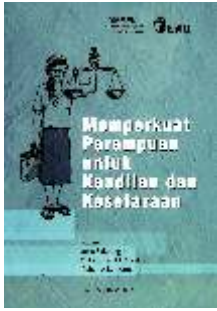
23 Juli 2018

Seminar Pembangunan KTI dan Bantuan Pembangunan Australia

Konsulat-Jenderal Australia di Makassar bekerjasama dengan BaKTI memfasilitasi Seminar Pembangunan KTI dan Bantuan pembangunan Australia, bertempat di Kantor BaKTI Makassar. Kegiatan ini diadakan dalam rangka kunjungan Ibu Julie Hecksher, Direktur Jenderal Asia Tenggara di Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Seminar ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam mengelola program pembangunan yang didukung oleh Bantuan Pembangunan Australia dan dimoderatori oleh Bapak Richard Mathews, Konsul-Jenderal Australia di Makassar serta dihadiri oleh sejumlah program dan mitra-mitra antara lain KOMPAK, MAMPU, dan AIPJ 2.





Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan

EDITOR Lusya Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K., Muh. Taufan Ramli

Diskriminasi menyebabkan perempuan mengalami berbagai permasalahan dan terbatasnya perempuan berperan di ranah publik. Perempuan mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, lembaga keuangan, dan layanan publik lainnya. Diskriminasi juga menyebabkan kemiskinan terhadap perempuan. Diskriminasi berbasis gender menimbulkan bentuk kemiskinan terhadap perempuan lebih sistematis dengan tingkat keparahan yang tinggi. Memperkuat perempuan adalah salah satu jalan untuk penghapusan diskriminasi menuju kesetaraan dan keadilan.



Potret Kehidupan Nelayan Tradisional di Papela - Pulau Rote

PENULIS Dr. Wilson M.A. Therik, SE, M.Si

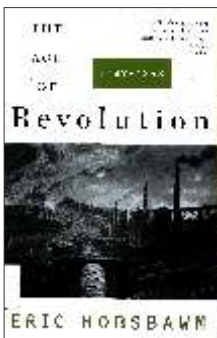
Buku ini mengisahkan pengalaman dari nelayan buruh maupun nelayan juragan tradisional Bajo di Tanjung Pasir-Papela, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur ketika berhadapan dengan arus perubahan melalui pembangunan dan ketika mereka ditempatkan dalam suatu sistem ekonomi pasar yang modern, terlihat bahwa tataran teoretis dan normatif tersebut belum diperhatikan dengan baik. Nelayan juragan selaku pemilik modal dan juga pemilik perahu dengan leluasa dapat "mengatur" segala kehidupan ekonomi rumah tangga keluarga nelayan buruh di Tanjung Pasir-Papela. Selain itu, nelayan juragan juga memanfaatkan ketergantungan nelayan buruh dengan mengambil keuntungan. Buku ini disarikan dari hasil penelitian Tesis Magister Sains pada Program Studi Magister Studi Pembangunan-Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan judul "Orang Laut di Tanjung Pasir Minum Madu Bercampur Racun".



Jurnal Analisis Sosial : Pemuda Desa, Peralihan Antargenerasi dan Perubahan Sosial

PENERBIT Akatiga

Jurnal ini merupakan Edisi Khusus 2016 dari AKATIGA. Ada empat topik besar yang menjadi fokus analisis kritis AKATIGA. Pertama, masalah perburuhan dan hubungan kerja/hubungan industrial dengan isu sentral seputar kebijakan pengupahan, pengorganisasian buruh dan pola-pola sengketa perburuhan. Kedua, masalah dinamika usaha kecil dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat dengan fokus kepada persoalan struktural yang dihadapi usaha kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakumulasi modal. Ketiga, masalah ketimpangan distribusi sumber daya utama rakyat yang difokuskan kepada isu struktural relasi agraria. Keempat, isu demokratisasi lokal yang bertujuan untuk memberikan pandangan kritis terhadap berbagai inisiatif di kalangan 'civil society' maupun pemerintah. Keempat topik kajian AKATIGA tersebut dilakukan dalam upaya membuka peluang kelompok miskin untuk membangkitkan kemandiriannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.



The Age of Revolution

PENULIS Eric Hobsbawm

Antara tahun 1789 dan 1848 dua pergolakan meluas—satu berasal dari Inggris, yang satu lagi dari Prancis—melabungkan dunia ke dalam modernitas. Tak ada satu pun yang mendokumentasikan dampak ganda dari Revolusi Industrial dan Revolusi Prancis lebih menyeluruh dan berwawasan luas daripada Eric Hobsbawm dalam pekerjaan magisterial ini, merupakan volume awal dari empat volume sejarah terciptanya dunia modern yang luar biasa. Lebih dari sekedar moment bersejarah yang sangat penting, *The Age of Revolution* adalah interpretasi yang brilian dan seringkali secara radikal tak terduga dari fenomena yang sekarang kita terima: transformasi petani menjadi buruh industri; penggantian monarki yang mahakuasa oleh kelas menengah yang berjaya; lahirnya sains, teknologi, dan ideologi baru; gelombang kejut yang beriak keluar dari Eropa ke Amerika, Asia dan Afrika. Ditulis dengan kejelasan dan keanggunan, zaman revolusi adalah karya tengara yang sangat diperlukan untuk memahami dunia di mana kita sekarang hidup.